

Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109
pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. FARDAN NGOYO

NIM 10800110047

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

ABSTRAK

Nama : Muh. Fardan Ngoyo
NIM : 10800110047
Judul :Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif-interpretif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS Kota Makassar yang mengetahui langsung penerapan akuntansi di BAZNAS Kota Makassar. Data sekunder juga didapatkan dari laporan keuangan, profil lembaga, dan arsip kegiatan BAZNAS Kota Makassar. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam temuan penelitian setelah dilakukan pengujian analisis data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan PSAK 109, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar menggunakan model single entry. Model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam pencatatan laporan keuangannya BAZNAS membagi pos dana menjadi 3 bagian yakni, kas dana Zakat, kas dana, infaq haji, dan kas dana infaq PNS. Sedangkan dalam penyalurannya membagi dan mencatat penyaluran sesuai dengan program yang ditetapkan yakni, program keagamaan, program kesehatan dan pendidikan, program ekonomi dan SDM, dan program bidang Sosial. Dalam proses pelaporan keuangannya BAZNAS Kota Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan yaitu single entry sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. BAZNAS Kota Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Kata kunci: Zakat, Infaq/Sedekah, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1-15
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
 BAB II : TINJAUAN TEORETIS	 16-45
A. Teori Legitimasi.....	16
B. Konsep Dasar Zakat dan Infaq/Sedekah.....	20
C. PSAK 109 tentang Zakat dan Infaq/Sedekah	29
D. Rerangka Konseptual	45
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	 46-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50

E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
G. Pengujian Keabsahan Data	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59-98
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	59
B. Praktik Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar.....	74
C. Kajian Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar	81
BAB V : PENUTUP.....	99-101
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
KEPUSTAKAAN.....	102
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar”. Salam dan salawat penulis haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Skripsi ini merupakan salah satu jenjang untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin.

Secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda A. Faridah dan ayahanda Haris yang telah melapangkan jalan penulis untuk menempuh pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, segenap curahan cinta dan kasih sayang dalam melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan penuh keikhlasan kepada penulis.

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Jamaluddin Madjid., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi SE, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Andi Wawo., SE, M.Si, Selaku Penasehat Akademik penulis, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester 1 hingga selesainya penulis menempuh studi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag dan Ibu Lince Bulutoding, SE, M.Si, Ak. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi.
7. Bapak Ketua BAZNAS Kota Makassar, Bendahara BAZNAS Kota Makassar Pak Katjong Tahir, SH dan staf BAZNAS Kota Makassar yang telah memberi izin dan berkenan menjadi informan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.
9. Teman-teman Akuntansi 2010, FOZ Community, IAPIM PD Makassar, dan KKN angkatan 49 kel Limbung yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, adik-adik, kakak-kakak

dan alumni Akuntansi UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan masukan kepada penulis.

10. Teman-teman HMI Cabang Gowa Raya, BEM-F Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Rumah Buku Carabaca yang telah menanamkan iklim intelektual yang kondusif dan menjadi kawan diskusi yang baik bagi penulis selama menjadi mahasiswa.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Fardan Ngoyo
NIM : 10800110047
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang / 23 Agustus 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : Jl. Barrang Caddi No. 28 Makassar
Judul : Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 20 September 2015

Penyusun,

Muh. Fardan Ngoyo
10800110047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar”, yang disusun oleh Muh. Fardan Ngoyo, NIM: 10800110047, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Selasa, 22 September 2015 M bertepatan dengan 09 Dzulhijjah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 September 2015 M

Jumat , 09 Dzulhijjah 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Majelis : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE, M.Si (.....)

Munaqisy I : Jamaluddin M. SE, M. Si (.....)

Munaqisy II : Dr. Wahyuddin Abdullah, M.Si, Ak (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag (.....)

Pembimbing II : Lince Bulutoding SE., M.Si, Ak (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag

NIP : 19581022 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam dimana perintahnya secara berulang-ulang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah tersebut menjadi landasan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat yang mampu (the have) kepada masyarakat yang kurang mampu (the have not). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)¹.

Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat pada masyarakat (umat), dan (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima.²

Potensi zakat di Indonesia menurut riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS, IPB, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 mencapai sebesar Rp 217 triliun. Namun potensi zakat yang bisa terserap menurut BAZNAS, baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja. Ini

¹Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft (ED) PSAK NO 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, 2008, h. 03.

²Mahmudi, Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan Teknik Fund Accounting. Makalah diskusi Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (P3E) FE UII, 2003, h. 01.

mengindikasikan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia.³ Dalam hal regulasi, pemerintah telah menerapkan sebuah aturan khusus dan spesifik mengenai pemungutan zakat kepada para wajib zakat (muzakki). Sebagai negara yang memiliki jumlah umat Islam yang cukup besar, langkah ini merupakan hal yang sepatutnya dilakukan. Mengingat bahwa pemungutan dana zakat yang dari sisi agama merupakan sebagai sebuah kewajiban.

Untuk mengatur pengelolaan zakat agar lebih terarah maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang hal itu. Aturan tersebut terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 yang memberikan legitimasi bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat maka perlu dibentuk badan/lembaga pengelola zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara independen. Sebelumnya aturan tentang zakat diatur dalam UU No 38 Tahun 1999 hingga dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat bagi mustahik.

Bahwa rendahnya tingkat kolektabilitas dana zakat di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan

³Nizar Nasrullah. "Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan" Jurnal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol 3 No 2, Tahun 2011, h. 02.

bermasyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat.⁴ Untuk mengatur kedua kendala dalam pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP No 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat Islam.

Nah, sesuai amanah dalam undang-undang tersebut, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki dan mempunyai wewenang untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan dana zakat kepada publik.

Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan apa, siapa, kepada siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.⁵ Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2008) dalam hasil penelitiannya yang mengemukakan bahwa :

⁴Adnan dalam Nikmatuniayah. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang. Jurnal Prosiding SnaPP 2012: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora (2012), h. 523.

⁵Osborne dalam Mardiasmo. Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Yogyakarta. 2003, h. 05.

“Salah satu sumber utama meraih kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang diberikan kepada publik, maka dengan itu diperlukan dukungan sistem akuntansi dan sistem manajemen yang memadai”.⁶

Golongan yang berhak menerima zakat tersebut sesuai tuntutan al-Quran disebut mustahik zakat yang harus diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pengelolaan dana zakat yang disalurkan tersebut kepada mustahik tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh pengelola dana zakat. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 2 poin g bahwa pengelolaan zakat berasaskan akuntabilitas, dan dijelaskan bahwa yang dimaksud asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.⁷ Makassar sebagai kota metropolitan yang memiliki penduduk mayoritas muslim juga harus mendapat perhatian serius. Mengingat bahwa potensi zakat di kota ini tentu membutuhkan pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan transparan kepada publik.

Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan

⁶Mahmudi dalam Nizar Nasrullah. “Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan” Jurnal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol 3 No 2, Tahun 2011, h. 25.

⁷Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 15.

akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.⁸

Akuntansi zakat merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Akuntansi zakat sebagai standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK 109, menjadi instrumen penting bagi lembaga pengelola zakat untuk memberikan laporan keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, umat (publik) dapat mengetahui dan memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat. Melalui kualitas laporan keuangan yang dilaporkan dengan menyesuaikan standar akuntansi zakat PSAK 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamahkan. Yakni, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penggunaannya kepada umat.

Namun pada kenyataannya, standar pelaporan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2012

⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft(ED) PSAK NO 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah, 2008, h. 01.

masih belum diterapkan secara menyeluruh. Masih banyak dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh. Seperti dalam temuan penulis pada penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Meski telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dari pengelolaan dana zakat yang telah diterima dari muzakki. Namun, penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang sesuai dengan standar PSAK 109 belum diterapkan secara menyeluruh. Padahal hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting untuk menyeragamkan model pelaporan keuangan agar dapat dipahami dengan baik oleh publik sebagai pihak yang berkepentingan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa (2012) di LAZ DPU Samarinda menemukan bahwa LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.⁹

Sehingga, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah. Dengan adanya penerapan PSAK 109 kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) secara baik dan benar akan dapat mewujudkan pengelolaan

⁹Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa, Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda [t.p](Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, 2012), h. 01.

dana zakat secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Adapun judul dalam penelitian yang dipilih adalah : “Kajian Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Makassar”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah kajian dalam penerapan pelaporan keuangan dan pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) berdasarkan pada PSAK 109. Sebelumnya PSAK 109 berbentuk Exposure Draft PSAK 109 yang diperkenalkan sejak tahun 2008. Setelah disosialisasikan dan mendapat berbagai masukan, PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2012.

Dalam PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana ZIS, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan institusi yang secara resmi untuk menghimpun dan mengelola dana zakat hingga menyalurkan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Badan amil zakat (baznas) kota Makassar yang tergolong sebagai salah satu organisasi sektor publik milik pemerintah berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan regulasi tersebut pula setiap organisasi pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, berkewajiban untuk membuat laporan keuangan. Proses pelaporan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang dimuat pada pasal 2 poin g UU No 23 Tahun 2011.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan didukung dengan analisis terhadap data dokumentasi laporan keuangan dan program pengelolaan zakat serta telaah literatur secara mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terkait sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat (baznas) kota Makassar berdasarkan PSAK 109.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami pendapat, sikap, dan tanggapan pimpinan/pegawai/staf keuangan sehubungan dengan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS kota Makassar. Oleh karena itu, pendapat mereka terkait penelitian ini sangat diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah data dokumenter laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar serta melakukan observasi langsung ke tempat penelitian.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar.
2. Apakah penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109.

D. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang bahwa badan amil zakat (baznas) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Organisasi Pengelola zakat (OPZ) harus menjalankan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 poin d UU No 23 Tahun 2011. Laporan tersebut harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan standardisasi pelaporan agar publik dapat menilai kinerja pengelolaan dana zakat oleh Organisasi pengelola zakat (OPZ). Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah antara lain:

1. Umi Khoirul Umah (2011)¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang. yang meliputi analisis terhadap Pengakuan, Pengukuran,

¹⁰ Umi Khoirul Umah. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Skripsi. (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2011), h. v.

Pengungkapan dan Pelaporannya kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.

Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode cash basic atau basis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para pengelola organisasi zakat mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Akun-akun yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah lebih terperinci dan tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan akuntansi organisasi pengelola zakat. Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca. Sedangkan sebuah laporan keuangan menurut PSAK No. 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa (2012)¹¹

Penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda”. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana Perlakuan

¹¹Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda [t.p](Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, 2012), h. 01.

Akuntansi Dana Zakat, Infaq da Shodaqoh dalam Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan mengacu pada PSAK nomor 109. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa temuan yang dapat diangkat, diantaranya yaitu LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

3. Andi Metari Setiaware (2013)¹²

Penelitian oleh Andi Metari Setiaware ini berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah pada lembaga amil zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Cabang Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infk/sedekah yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa Cabang Makassar dan apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Dompot Dhuafa menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu memisahkan dana menurut

¹²Andi Metari Setiariware. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. vi.

sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari'ah. Dompot Dhuafa secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ziswaf dari masyarakat.

Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat dompet dhafa cabang Makassar belum mengacu pada PSAK 109.

4. Enggar Estika Handoko (2013)¹³

Penelitian oleh Enggar yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika” membahas tentang pencatatan dan pelaporan akuntansi yang diterapkan pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Dalam hasil analisis yang dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan pencatatan dan pelaporan keuangan Yayasan dompet dhuafa dengan apa yang ditetapkan oleh PSAK 109 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan PSAK 109 di dompet dhuafa.

¹³Enggar Handoko. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Skripsi. (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 2013), h. viii.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam penelitian tersebut. Terutama dalam pemakaian format pelaporan keuangan dan pengungkapannya. Ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam PSAK 109 yang belum diungkapkan Dompri Dhuafa di laporan keuangannya. Misalnya dalam soal pengungkapan penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf. Sementara pengungkapan dalam pelaporan keuangan oleh Dompri Dhuafa menggunakan pendekatan program.

5. Nurhaida Widyarti M (2014)¹⁴

Penelitian oleh Nurhaida yang berjudul “Studi Evaluatif Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109” ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi zakat pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Temuan penelitian menunjukkan sistem pencatatan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/shadaqah yang digunakan pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan single entry. Model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam proses pelaporan keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan yaitu single entry sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK

¹⁴ Widyarti Nurhaida M. Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin , 2014), h. viii.

109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kajian penerapan PSAK 109 tentang zakat dan prinsip Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pengelolaan Zakat ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui secara kualitatif penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat (baznas) kota Makassar.
- b. Untuk memberikan rekomendasi literatur mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian tentang penerapan PSAK 109 tentang zakat pada badan amil zakat (baznas) Kota Makassar mempunyai beberapa kegunaan. Dengan mengambil objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara:

a) Manfaat Praksis

Secara praksis penelitian ini bermanfaat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya dalam hal ini badan amil zakat (baznas) Kota Makassar sebagai tempat penelitian penulis. Dengan melihat penerapan dan implementasi dalam pelaporan keuangan yang digunakan oleh baznas Kota Makassar, hal ini dapat menjadi bahan analisa dan evaluasi terhadap proses pelaporan yang selama ini

diterapkan pada organisasi pengelola zakat (OPZ). Sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang agar meningkatkan pengelolaan dana zakat secara optimal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

b) Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merekonstruksi kerangka teoretis bagi akademisi dalam mengembangkan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang transparan dan akuntabel. Secara teoretis, penelitian ini ingin menguji dan mengembangkan teori legitimasi dalam penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109.

c) Manfaat Regulasi

Dengan hasil penelitian ini, setelah melakukan kajian dan evaluasi terhadap kinerja lembaga amil zakat dan implementasi PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah. Dengan melihat penerapan akuntansi yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan regulasi pengelolaan zakat seperti dalam UU No 23 Tahun 2011. Bagi pengambil kebijakan dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat menjadi acuan dalam memperkuat dan memperbaiki aturan pengelolaan zakat bila masih terdapat kekurangan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Legitimasi

Teori legitimasi, Menurut Dowling (1975), adalah suatu kondisi dimana sistem nilai suatu entitas perusahaan kongruen dengan sistem nilai lingkungan sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut berada, jika perbedaan antara dua sistem nilai ini terjadi, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi entitas tersebut.¹⁵ Sejalan dengan itu Hadi (2011) menyatakan bahwa, legitimasi merupakan sistem yang pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat.¹⁶ Sedangkan menurut yang dijelaskan Meutia (2010), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.¹⁷

¹⁵Dowling dalam Eka Siskawati dan Elfitri Santi, “Akuntabilitas Lingkungan pada PT Semen Padang dalam Perspektif Legitimacy Theory”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 4 No 1 (2009) h. 44.

¹⁶Hadi dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, Jurnal Akuntansi Keuangan Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271.

¹⁷Meutia dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, Jurnal Akuntansi Keuangan Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271.

Dari pernyataan di atas bisa dikaitkan dalam konteks pengelolaan dana zakat yang secara legitimasi dipercayakan oleh masyarakat kepada BAZNAS kota Makassar. Sistem nilai dan norma sosial tersebut dalam bentuk aturan pelaporan keuangan yang dinyatakan dalam PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah. Bahwa sebagai pihak yang mengemban amanah, pengelola zakat memiliki kewajiban agar melaporkan hasil kinerjanya dalam bentuk pelaporan agar kemudian bisa dikonsumsi oleh para pemangku kepentingan atas laporan tersebut. Sehingga akan menguatkan legitimasi organisasi pengelola zakat (OPZ) di mata masyarakat. Selain itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki kepada pengelolaan zakat sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan partisipasi wajib zakat kepada lembaga amil zakat. Pelaksanaan akuntabilitas pengelola zakat wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban amanah. Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi:

قَدْ لَبِثْتُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا يُكْسِبُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.¹⁸

Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Cet: Al-Juamnatul 'Ali, hal.180.

tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara. Sebagaimana digambarkan dalam Hadist Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Abi Hurairah r.a., Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

:

Terjemahnya:

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah saw bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; 'Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.'"(HR. Bukhari)¹⁹

Pertanggungjawaban juga dilakukan agar tetap berada pada tatanan aturan yang telah ada. Aturan yang mengatur mengenai akuntabilitas keuangan dalam penerapan PSAK 109 menjadi aturan mutlak dalam menjalankan pengelolaan zakat juga dibentuk sebagai mesin penjawab mengenai kebutuhan informasi akan laporan pengelolaan dana zakat yang berguna bagi masyarakat luas. Akuntansi dalam hukum Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan

¹⁹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Jafii, Kitab Shahih Bukhari, juz VIII (cet. I [t.t]: Dar tauqun an-Najah, 1422 H), h. 104.

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS al-Baqarah/2:282).²⁰

Oleh karena itu, proses pengumpulan, pendistribusian, merupakan amanah oleh Allah dan umat untuk dipertanggungjawabkan dengan baik. Ayat tersebut di atas, mengisyaratkan akan pentingnya proses pencatatan dalam segala aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan muamalah. Tidak terkecuali dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS kota Makassar.

B. Konsep Dasar Zakat dan Infaq/Sedekah

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat adalah isim masdar dari zaka-yazku-zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Pengertian ini merujuk pada al-Qur'an diantaranya:

وَلْيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠١﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٢﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٣﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٤﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٥﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٦﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٧﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٨﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٩﴾
 وَيُؤْتِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٠﴾

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul 'Ali, h. 48.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S at-Taubah/ 9:103)”²¹

وَمَا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا السَّبِيلَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (al-Ruum/30: 39)”²²

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi: 1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur’an sepadan dengan kata shadaqah. Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109²³:

“Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) baik melalui amal maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya”.

2. Pengertian Infaq dan Sedekah

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 203.

²²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 408.

²³Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 03.

diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

3. Macam –Macam Zakat

a. Zakat Fitri (Barang Makanan)

Zakat fitri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitri setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah atau negeri yang bersangkutan.²⁴ Menurut mayoritas ulama, zakat fitri juga bisa ditunaikan dengan uang, dengan syarat ada akad jual beli sebelumnya bahwa uang tersebut sebagai pengganti makanan pokok tersebut. Kewajiban zakat fitrah, merujuk pada al-Qur'an dan beberapa hadits, di antaranya:

²⁴Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal. 47.

QS Al-A'laa/87 :14-15).

Terjemahnya :

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang. (QS Al-A'laa/87 :14-15).²⁵

Sementara itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa :

a) a (

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Rhasulullah saw mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, dan makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang membayarnya sebelum sholat, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah sholat maka ia adalah shodaqoh biasa”. (Diriwayatkan Abu Dawud dan dishohihkan oleh al-Hakim).²⁶

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu serta untuk orang-orang atau golongan yang juga telah ditentukan dalam syariat atau peraturan yang berlaku.²⁷

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul 'Ali, h. 591.

²⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, Terjemah Bulughul Maram Jilid I, (Cet I; Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), h. 262.

²⁷Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 42.

4. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Membayar zakat hukumnya wajib, artinya orang yang tidak membayar zakat mendapat dosa dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah: 103 dengan memenuhi syarat harta yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Dalam buku kecil Panduan Zakat dompet dhuafa, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain²⁸:

a. Milik penuh (Al-milk al-Tam)

Harta yang dimiliki secara penuh yang memungkinkan pemiliknya menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh serta di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang dimiliki secara penuh tersebut mestilah didapatkan melalui proses yang dibenarkan oleh syara, sebab harta yang diperoleh dengan cara yang haram, zakat tidak wajib atas harta tersebut karena harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak/ahli warisnya.

b. Berkembang (Annama)

Yang dimaksud dengan harta berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang dan dapat memberi keuntungan seperti pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak.

c. Cukup Nishab.

Yang dimaksud “cukup nishab” adalah telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara .

²⁸Ahmad Hadi Yasin. Panduan Praktis Zakat Dompet Dhuafa.pdf, h. 15-18.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok (Al-hajjatul Ashliyyah)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan minimal tersebut tak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, dan pendidikan.

e. Bebas dari hutang

Orang yang memiliki hutang akan terbebas dari mengeluarkan zakat, jika hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer, sebab orang yang mempunyai hutang bukanlah orang yang kaya. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang kaya.

f. Sudah Satu Tahun (Al-Haul)

Persyaratan kepemilikan sudah berlalu selama 12 bulan qomariyah hanya berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, riqaz (barang temuan) tidak dipersyaratkan setahun.

5. Harta yang Wajib Dizakati²⁹

a. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- 1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
- 2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- 3) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

²⁹Ahmad Hadi Yasin, Panduan Praktis Zakat Dompot Dhuafa.pdf, h. 18-21.

- 4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

b. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
- 2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- 3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- 4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

c. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibukkan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman

keras, tana man hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

e. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- 1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- 2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- 3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

f. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing

negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak.

Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

g. Properti Produktif

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- 2) Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- 3) Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

C. PSAK 109 tentang Zakat dan Infaq/Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang zakat dan Infaq/Sedekah merupakan standar yang berlaku lagi pengelola zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki.

1) Pengakuan dan Pengukuran³⁰

Pengakuan Awal

a. Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

Kas - Dana Zakat	xxx	
	Dana Zakat	xxx

- b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Aset non kas	xxx	
	Dana Zakat	xxx

- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

³⁰Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah 2008, h. 03.

Jurnal :

Dana Zakat xxx

 Dana Zakat-Amil xxx

 Dana Zakat-non amil xxx

- 5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal saat mencatat penerimaan fee :

Kas-Dana Zakat xxx

 Dana Zakat-Amil xxx

Pengukuran setelah pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil xxx

 Aset Nonkas xxx

b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dana-Amil Kerugian xxx

Aset Non kas xxx

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar;

a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil xxx

Kas-Dana Zakat xxx

b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil xxx

Aset Non kas-Dana Zakat xxx

b. Infaq/Sedekah

Pengakuan Awal

1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

Kas - Dana Infak/Sedekah xxx

Dana Infak/sedekah xxx

b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;

Aset Nonkas (nilai wajar)-Lancar Dana Infak xxx

Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak xxx

Dana Infak/Sedekah xxx

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah xxx

Dana Infak/Sedekah-Amil xxx

Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran setelah pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut

diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar :

Dana-Non amil	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Non lancar	xxx

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
----------------------------	-----

Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx
--------------------------------	-----

b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dana-Kerugian	xxx
---------------	-----

Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx
--------------------------------	-----

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal :

Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx
-----------------------------	-----

Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah	xxx.
---------------------------------	------

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah xxx

 Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Jurnal :

Piutang-Dana Infak/Sedekah xxx

 Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Penyajian³¹

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3. Pengungkapan³²

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- 5) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) sifat hubungan istimewa;
 - b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

³¹Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 07.

³²Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah 2008, h.7-9.

- c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infaq/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 4) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- 5) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas (poin 4) diungkapkan secara terpisah;
- 6) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- 7) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- 8) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- 9) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) sifat hubungan istimewa;
 - b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

4. Laporan Keuangan Amil³³

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari :

a. Neraca

³³Ikatan Akuntan Indonesia, Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/Sedekah, 2008, h. 10-15.

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset;

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Instrumen keuangan
- 3) Piutang
- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban;

- 1) Biaya yang masih harus dibayar
- 2) Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana;

- 1) Dana zakat
- 2) Dana infaq/sedekah
- 3) Dana amil
- 4) Dana non halal

Ilustrasi I

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ (XXX)
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus	xxx

Instrumen keuangan Piutang	xxx xxx	dibayar	
Aset tidak lancar		Kewajiban jangka panjang	xxx
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan dana	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah)

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

1) Penerimaan dana zakat

a) Bagian dana zakat

b) Bagian amil

2) Penyaluran dana zakat

a) Entitas amil lain

b) Mustahiq lainnya

3) Saldo awal dana zakat

- 4) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

- 1) Penerimaan dana infak/sedekah
 - a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 2) Penyaluran dana infak/sedekah
 - a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 3) Saldo awal dana infak/sedekah
- 4) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

- 1) Penerimaan dana amil
 - a) Bagian amil dari dana zakat
 - b) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - c) Penerimaan lainnya
- 2) Penggunaan dana amil
 - a) Beban umum dan administrasi
- 3) Saldo awal dana amil
- 4) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

- 1) Penerimaan dana nonhalal
 - a) Bunga bank

- b) Jasa giro
- c) Penerimaan nonhalal lainnya
- 2) Penyaluran dana nonhalal
- 3) Saldo awal dana nonhalal
- 4) Saldo akhir dana nonhalal

Ilustrasi II

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah)

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

- 2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- 3) Penambahan dan pengurangan
- 4) Saldo awal
- 5) Saldo akhir

Ilustrasi III

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)		-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah)

d. Laporan Arus Kas

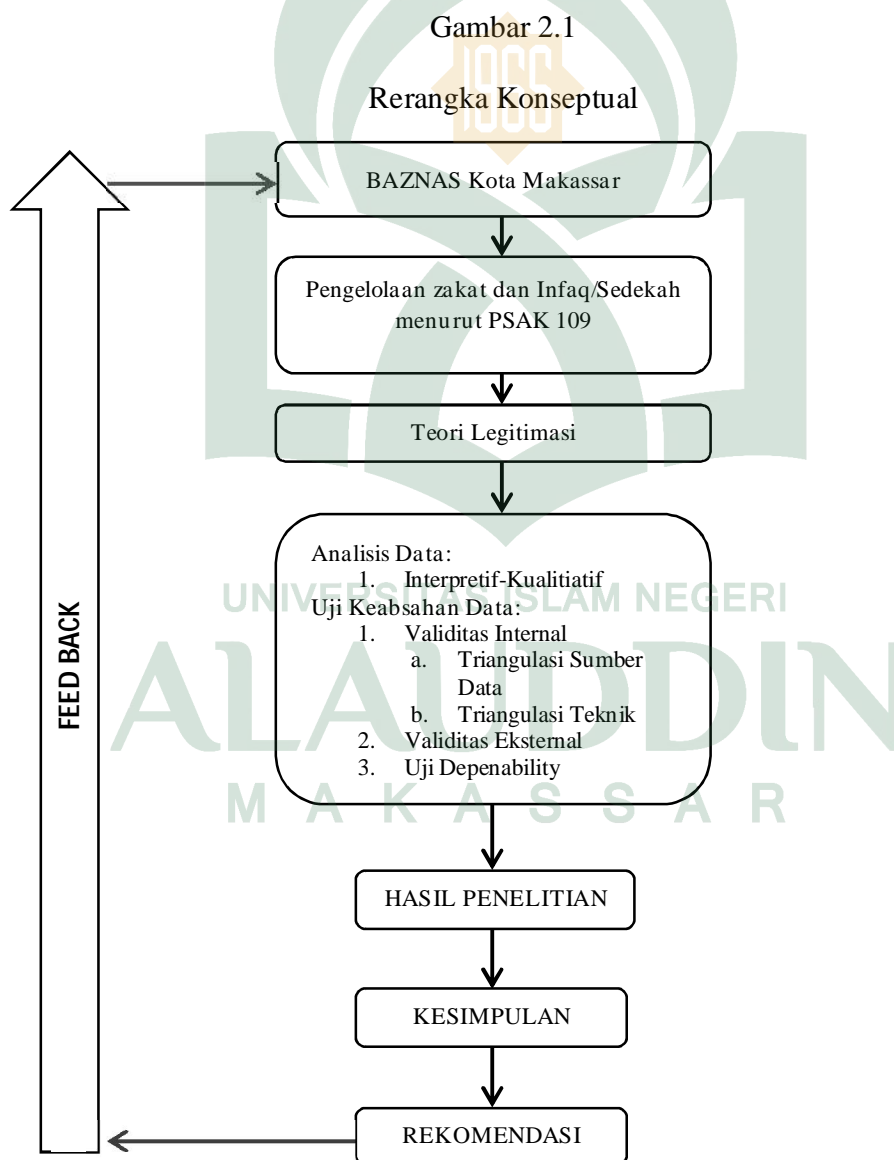
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

D. Rerangka Konseptual

Dari penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, pembahasan mengenai realitas penerapan PSAK 109 yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam hal ini untuk menciptakan perilaku amanah sehingga akuntabilitas sebagai khalifatullah fil ardh dapat tercapai. Secara sederhana, rerangka konseptual dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan tentang kajian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sekedah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian interpretif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi.³⁵ Anis Chariri (2009) mengemukakan penelitian interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu.³⁶ Anis Chariri (2009) menambahkan bahwa tujuan dari penelitian interpretif adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.³⁷

³⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 09.

³⁶Anis Chariri, "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif"(Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.

³⁷Anis Chariri, "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif"(Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.

Pada hakikatnya penelitian interpretif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti yang memandang suatu objek sebagai sesuatu yang sangat dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³⁸

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar. Responden di BAZNAS Kota Makassar yang menjadi subyek penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian keuangan, pegawai/staf pemegang kas, kepala sub bagian keuangan dan ketua/anggota BAZNAS Kota Makassar.

Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan tempat penelitian ini karena, BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pengelola dana zakat yang didirikan oleh pemerintah dengan berbagai tingkatan mulai kabupaten/Kota hingga tingkat nasional. Selain itu, BAZNAS sesuai undang-undang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat yang secara hukum memiliki legalitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, amanah, dan tanggung jawabnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Vredenberg (1978) merumuskan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek; data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Pollit dan

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 10.

Hungler memahami studi kasus sebagai metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap individu, keluarga, kelompok, lembaga atau satuan sosial lainnya.³⁹

Beberapa ahli metodologi lainnya mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang (multi-perspective analysis) mengenai suatu fenomena atau gejala sosial dalam konteks yang alamiah. Studi kasus berguna dalam memberikan jawaban atas pertanyaan “Bagaimana?” (How) dan “Mengapa?” (Why), dan dalam konteks ini dipergunakan untuk penelitian eksplorasi, deskripsi, dan penelitian eksplanatori (menjelaskan).⁴⁰ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan metode penelitian ini, penulis anggap sesuai dan mampu menjelaskan secara terperinci proses penelitian ini.

Berikut ini adalah kekuatan studi kasus berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Anol Bhattacharjee :

Kekuatan studi kasus, Pertama dapat digunakan baik untuk kepentingan membangun teori maupun menguji. Sementara metode-metode berbasis positivis hanya dapat digunakan untuk menguji teori. Kedua, pertanyaan penelitian dapat diubah selama proses penelitian berlangsung jika pertanyaan awal ternyata kurang relevan. Dalam metode berbasis positivis hal ini tidak mungkin dilakukan. Ketiga, studi kasus dapat membantu menyusun dan menginterpretasikan data secara lebih kontekstual dan lebih otentik tentang suatu fenomena dibandingkan metode-metode penelitian lain. Keempat, fenomena dapat dipelajari dari berbagai perspektif para partisipan dan menggunakan berbagai tingkat analisis (misalnya individu dan organisasi).⁴¹

³⁹Vredenberg, Pollit dan Hungler dalam Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th]) h. 14.

⁴⁰Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th]) h. 13.

⁴¹Anool Bhattacharjee dalam Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th]) h. 14.

Dengan karakteristik dan kekuatan penelitian studi kasus tersebut dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa dan medeskripsikan proses dan hasil penelitian melalui data yang diperoleh di BAZNAS Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data subyek dan data dokumenter. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).⁴² Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.⁴³ Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan berupa laporan tahunan, jurnal, buku, majalah, dan artikel publikasi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas: sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan

⁴²Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 145

⁴³Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 146.

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki persoalan yang hampir sama, jurnal-jurnal, dokumen dan arsip-arsip, serta buku-buku dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa pelaporan keuangan, pelaporan program, pelaporan manajerial, hingga aktivitas terkait pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat (baznas) Kota Makassar.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini termasuk metode penelitian opini (opinion research) yang merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang (responden). Data yang diteliti dapat berupa pendapat responden secara individual atau secara kelompok.⁴⁵ Sedangkan, metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu (historis). Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian

⁴⁴Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 147.

⁴⁵Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 29.

aspek dari data sekunder kemungkinan tidak sesuai kebutuhan suatu penelitian. Oleh karena itu, sebelum menggunakan data sekunder harus melakukan evaluasi apakah data sekunder yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan peneliti.⁴⁶

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder. Penelusuran data sekunder memerlukan cara agar penelitian data dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dapat dimulai dengan penelusuran terhadap indeks bibliographic, yaitu indeks mengenai judul artikel, penulis, nama dan jenis penerbitan atau data indeks lain yang sesuai dengan klasifikasi desain dan metode penelitian. Jika tidak tersedia indeks bibliographic maka peneliti dapat menggunakan daftar referensi dalam buku atau artikel yang dimuat dalam jurnal atau surat kabar.⁴⁷

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke kantor badan amil zakat (baznas) kota Makassar.

- a. Studi Dokumentasi

Yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder dalam dokumen-dokumen organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terkait dengan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Data dokumenter berupa laporan keuangan, laporan program,

⁴⁶Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 147.

⁴⁷Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 150.

jurnal, data transaksi dan sebagainya. Data tersebut dapat menjadi bahan atau dasar dalam melakukan analisis data yang telah dikumpulkan.

b. Observasi

Merupakan teknik mengumpulkan data primer dengan pengamatan langsung kepada subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci, lebih akurat, dan bebas dari respons bias.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dan menganalisis konten (content analysis) dari dokumen terkait penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah di kantor badan amil zakat (baznas) Kota Makassar.

c. Wawancara Mendalam (in-dept interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pengurus/karyawan/staf atau pimpinan badan amil zakat (baznas) Kota Makassar terkait hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan (library research)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan

⁴⁸Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 157.

⁴⁹Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 152.

kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data lisan, tulisan, maupun dalam bentuk dokumentasi laporan. Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka diperlukan beberapa instrumen berupa alat untuk menunjang proses perolehan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perekam suara
2. Buku catatan
3. Handphone
4. Kamera
5. Alat tulis
6. Daftar Pertanyaan wawancara.
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
8. Akses Internet

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada BAZNAS kota Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan

membandingkan akuntansi zakat dan infak /shadaqah yang diterapkan pada BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109.

Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh nantinya. Peneliti memilih langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan Analisis interaktif menurut Miles dan Heberman (1984), sebagai berikut:

1. Reduksi Data (data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁰ Dalam reduksi data tersebut, peneliti menyesuaikan antara aturan PSAK 109 dengan fakta penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS kota Makassar.

2. Penyajian Data (display data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pitogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.⁵¹

⁵⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 247.

⁵¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “ the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵² Dalam penelitian ini, berusaha menguraikan, mendeskripsikan dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar berdasarkan PSAK 109.

3. Penarikan Kesimpulan/Pengujian (Concluding Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sang peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵³ Pengambilan kesimpulan merupakan hal yang penting, karena setelah melalui tahap wawancara, observasi dan telaah pustaka maka langkah selanjutnya adalah dengan verifikasi data mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Sehingga deskripsi dan uraian naratif mengenai penelitian ini dapat disampaikan dan dimengerti oleh khalayak.

⁵²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 252.

⁵³Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 252.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Validitas Internal (Uji Kredibilitas)

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.⁵⁴ Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan data yang bermacam-macam. Maka metode pengujian yang paling tepat adalah dengan menggunakan triangulasi, yakni sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber Data

Menurut Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.⁵⁵ Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Maka data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda hingga menganalisis dan menghasilkan kesimpulan mengenai

⁵⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cetakan ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 270.

⁵⁵Patton dalam Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-XXXI; Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 331.

penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS kota Makassar.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.⁵⁶ Maka, dalam penelitian ini dilakukan pengecekan pada hasil wawancara kepada anggota, staf, dan karyawan BAZNAS kota Makassar dengan memperhatikan data dokumentasi pelaporan keuangan dan dokumentasi program penyaluran dana zakat.

2. Validitas Eksternal (Transferability/Generalisasi)

Validitas eksternal berkaitan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi dimana sampel diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.⁵⁷ Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil

⁵⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 274.

⁵⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 267.

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.⁵⁸

3. Uji Reliabilitas (Depenability)

Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit/pemeriksaan terhadap proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini, terkait dengan penelitian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS kota Makassar, dosen pembimbing dapat melakukan audit/pemeriksaan terhadap keseluruhan proses aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bila peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka depenabilitas dalam penelitian ini patut diragukan.

⁵⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 276.

⁵⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 277.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kab/kota maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota. Kota Makassar yang berada di provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelola zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Kota Makassar merupakan merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Makassar pada Tahun 2014 sebanyak 1.406.072 jiwa yang terdiri dari 695.955 laki-laki dan 712.117 perempuan. Penduduk Kota Makassar merupakan penduduk yang heterogen yang berasal dari suku dan agama yang berbeda namun mayoritas penduduk Kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, Maka kehadiran BAZNAS Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup umat khususnya di Kota Makassar.

Sejak berdirinya, di tahun 2005 silam, BAZNAS Kota Makassar dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Kota Makassar. Kemudian dengan mengacu pada peraturan daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU

No 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus berpedoman dengan aturan tersebut.⁶⁰

Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No 23 Tahun 2011. Hingga kini kekengurusan BAZNAS Kota Makassar masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No 1190 Tahun 2012 periode pengurusan BAZDA Kota Makassar 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini memberikan wewenang perpanjangan masa kepengurusan sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Dari pengamatan peneliti sejak April 2015 proses pembaharuan kepengurusan telah dimulai dan akan berlaku di tahun 2015. Sejak Tahun 2007 BAZNAS Kota Makassar telah menempati kantor yang berada di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Kompleks Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menunjang aktivitas BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang mempunyai wewenang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang didirikan pemerintah, BAZNAS Kota Makassar telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah/SKPD, perusahaan daerah, sekolah-sekolah negeri, hingga UPZ pada tingkat kecamatan berdasarkan himbauan walikota Makassar. Ditambahkan oleh Bendahara BAZNAS yang mengatakan bahwa :

“Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Makassar 99% merupakan berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini SKPD Kota Makassar. Di sana juga telah dibentuk UPZ yang bertugas mengumpulkan zakat. Pengumpulan

⁶⁰Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati, SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS.

zakat di SKPD memang masih belum efektif. Hanya beberapa SKPD di Kota Makassar yang “patuh” untuk membayarkan zakatnya.”⁶¹

2. Visi dan Misi⁶²

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil yang profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam”.

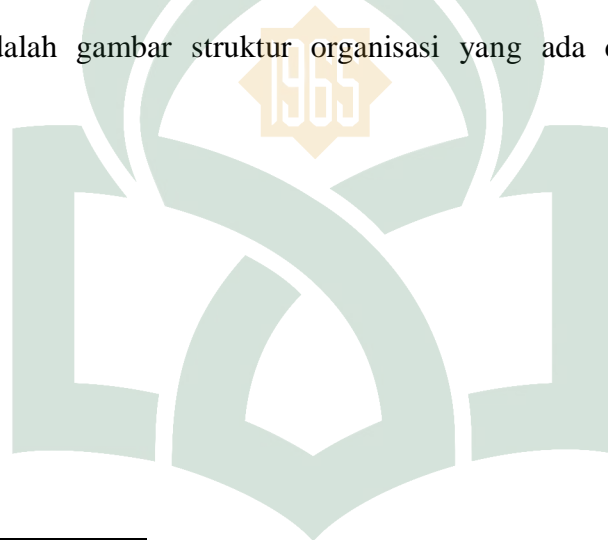
Adapun Misi yang akan diemban oleh BAZNAS Kota Makassar adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) serta mendayagunakan ZIS.
- c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

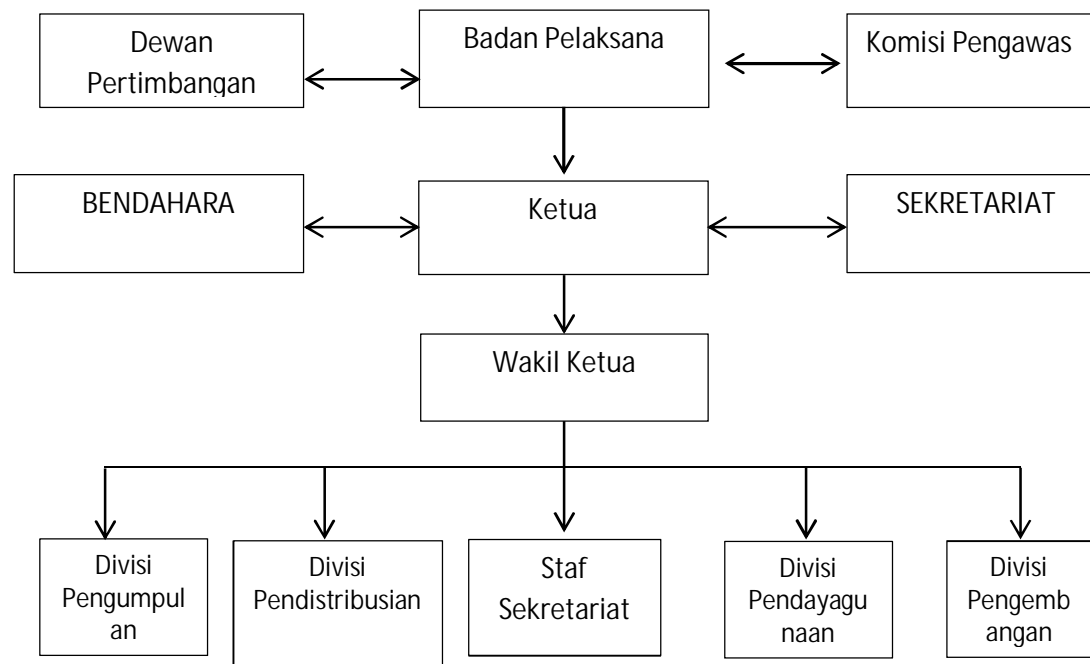
Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Berikut adalah gambar struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kota Makassar:



⁶¹Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS.

⁶²Dokumen BAZNAS Kota Makassar, Brosur Profil BAZNAS Kota Makassar.



Gambar 4.1 struktur organisasi badan pelaksana BAZNAS

Sumber : dokumen BAZNAS Kota Makassar

4. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Makassar⁶³

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Makassar Periode 2009-2012
(Perpanjangan Sementara)

a) Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. A. G. H. Muhammad Ahmad

Wakil Ketua : Dr. H. Burhanuddin

⁶³ Arsip BAZNAS Kota Makassar, SK Kepala Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan No 1190 Tahun 2012.

Sekretaris : Dr. H. M. Alwi Uddin, M.Ag

Wakil Sekretaris : Drs. H. Muhammad Qasim, M.Si

Anggota : Drs. Muh. Kasim

Drs. H. Jalaluddin Sanusi

H. Abu Naim Sanre, BA

Drs. H. M. Alwi Nawawi

Drs. H. M. Yunus

b) Komisi Pengawas

Ketua : Drs. Jafar Sodding

Wakil Ketua : Drs. H. Hamsiar

Sekretaris : Drs. Jamil

Wakil Sekretaris : Drs. Mustamin Umar

Anggota : Drs. K.H. Abdul Muttalib

Dr. H. Abd. Kadir Achmad

Drs. H. M. Amin Sikki

Erwin Safruddin, S. STP, M.Si

H. Arifuddin Lewa, S.Hi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

c) Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Abd Latif Jusuf

Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Wahid, SH, MH

Wakil Ketua II : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

Wakil Sekretaris : Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

Wakil Sekretaris I : H. Abd Aziz Bennu, S.Ag

Wakil Sekretaris II : Syahrul Mubarak, SE,MM

Bendahara : H. Katjong Tahir,SH

SEKSI-SEKSI

1. Seksi Pengumpulan

Ketua : Drs. H. Ismail Nurdin, MH

Anggota : H. Muhyiddin SE, MM

Drs.Djunaid Shahib, M.Ag

H. Mahyuddin, SH

Junaidi, SE.I

2. Seksi Pendistribusian

Ketua : Drs. Mukhlis Chalid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Anggota : Drs. H. M. Arif B

Dahlan Lamabawa, S.Ag, M.Ag

H. Lukman Hakim

Darmawati, SE

3. Seksi Pendayagunaan

Ketua : Prof. Dr. H. Mustari Bosrah, MA

Anggota : Drs. Saharuddin Yaseng, M.Ag

H. Syahrudin, S.Sos

Sri Surya, SE

Drs. Dahla Yaring

4. Seksi Pengembangan

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag

Anggota : Drs. Abd. Rahim Razak, M.Pd

Muhammad Syahrir B, SE

H Muhammad Basri Nahir, S.Sos

5. Tugas dan Wewenang⁶⁴

⁶⁴Dokumen Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar.

Uraian tugas (job description) yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab pada BAZNAS Kota MAKassar secara garis besar sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menetapkan garis-garis kebijakan umum badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan badan pelaksana. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta atau tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada komisi pengawas dan badan pelaksana.

b. Komisi Pengawas

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

c. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan badan amil zakat dalam program pengumpulan. Membuat rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatnya.

d. Seksi Pengumpulan

- 1) Bertugas mengumpulkan daftar list nama dan alamat muzakki di seluruh wilayah Kota Makassar untuk menjaring potensi zakat yang dapat terkumpul untuk dikelola oleh BAZNAS.
 - 2) Membuat himbauan atau permintaan pengumpulan zakat dan infak/Sedekah dilampirkan brosur dan lain-lain ditujukan kepada golongan kaya.
 - 3) Merancang metode pengumpulan dari kelompok masyarakat umum melalui jenjang pegawai, dinas, karyawan swasta, jenjang sekolah, jalur pemerintah kota.
 - 4) Membuat formulir atau kupon dan mekanisme pengumpulan uang zakat dan infak/sedekah dengan membentuk tim yang solid.
 - 5) Melaksanakan tertib administrasi dengan ketatausahaan yang memadai untuk membangun kepercayaan masyarakat.
 - 6) Mengurus sistem pemungutan zakat yang dapat mengurangi pembayaran setoran pajak dan mensosialisasikan penerapannya pada level pimpinan baik pegawai dinas maupun perusahaan swasta muslim.
- e. Seksi Pendayagunaan
- 1) Bertanggungjawab penuh terhadap dana pendayagunaan untuk dikelola bagi kepentingan mustahiq.
 - 2) Membuat laporan pendayagunaan dengan skala prioritas.
 - 3) Membentuk tim survei untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi mustahiq di bidang ekonomi, lingkungan, budaya, dan intelektualitas.
 - 4) Mengadakan pelatihan ekonomi manajemen, kewirausahaan, keterampilan dan kerajinan.
 - 5) Menyalurkan bantuan pendidikan bagi pelajar berprestasi dari tingkatan SMA hingga S3.

f. Seksi Pendistribusian

- 1) Bertanggungjawab terhadap kebijaksanaan mendistribusikan dana santunan kepada mustahiq yang berhak.
- 2) Menyusun daftar mustahiq dan klasifikasinya.
- 3) Melayani bantuan amal sosial dengan ramah, bijaksana, dan selektif sesuai dengan anggaran yang tersedia.

g. Seksi Pengembangan

- 1) Memonitor sistem organisasi BAZNAS dan luar BAZNAS melalui pertukaran informasi, bentuk kerjasama, seminar, artikel dari majalah atau koran maupun internet.
- 2) Mengkaji keefektifan metode manajemen BAZNAS yang sedang berjalan dalam menangani masyarakat yang selalu berkembang.
- 3) Secara dinamis mengadakan perkembangan sistem dan metode yang kurang efektif dan efisien segera.
- 4) Mengadakan seminar untuk sosialisasi program dan dengan maksud untuk mendapatkan input dari masyarakat.
- 5) Memberikan kesempatan kepada staf dengan program studi di tempat lain.
- 6) Membuat laporan kerja secara periodikal hasil kerja yang telah tercapai.
6. Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar melakukan penghimpunan dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Pengumpulan dengan menyetorkan secara langsung ke BAZNAS Kota Makassar dengan mengisi form yang telah disediakan kemudian menyetor langsung kepada bendahara BAZNAS.

b. Muzakki mengirim donasi atau zakatnya via bank dan mengonfirmasi ke pihak BAZNAS. Untuk mempermudah pengumpulan melalui bank tersebut pihak BAZNAS telah menyediakan Rekening tujuan yang beragam agar muzakki memiliki pilihan untuk mengirimkan melalui bank yang tersedia. Diantara rekening tersebut yakni:

- 1) Bank Sul-Sel :0130.003.000012520-8
- 2) BNI Syariah : 0092648668
- 3) Bank Mandiri : 152.000518995-2
- 4) Bank Syariah Mandiri : 0140017677
- 5) BRI : 00000050.000671.30.7
- 6) BNI : 6821303.5
- 7) Bank BTN : 0004-01-50-058700-9
- 8) Bank Mega Syariah : 000027.25
- 9) Bank Permata Syariah : 8510228155

c. Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Makassar tertanggal 17 Mei 2010 BAZNAS Kota Makassar berhak melakukan pengumpulan dana zakat dan infaq/sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di beberapa instansi pemerintah diantaranya SKPD Kota Makassar, kecamatan, perusda, kementerian Agama hingga sekolah-sekolah melalui himbauan walikota Makassar. Hal ini untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang berasal dari PNS.

7. Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Makassar

Sesuai dengan perintah yang termaktub dalam surah at-Taubah ayat 60, firman Allah swt yakni :

وَالزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْمُعَلَّلِينَ وَالْمُسْتَضَرِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَرِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *
 وَالزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْمُعَلَّلِينَ وَالْمُسْتَضَرِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَرِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah/9:60)⁶⁵

Dari ayat tersebut ada 8 kategori objek yang berhak menerima zakat yakni:

- orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- Amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul 'Ali, h. 196.

- f. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Perintah dalam al-Quran tersebut merupakan landasan yang tegas secara syar'i untuk melaksanakan perintah zakat.

Dalam melakukan penyaluran BAZNAS Kota Makassar tetap mengacu kepada tuntunan dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi masa kini yang telah banyak berubah. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, pengurus telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk program-program agar proses penyaluran dapat memberikan efek yang nyata bagi para mustahiq zakat yang berhak memperoleh sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak H. Katjong Tahir:

“ Proses penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dilakukan dengan 2 cara yakni penyaluran langsung dan pelatihan-pelatihan. Kami tidak hanya

membagikan zakat secara langsung agar mustahiq dapat memperoleh manfaat dana zakat di kemudian hari.”⁶⁶

Selain itu, program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar diserahkan kepada yang berhak (mustahiq) yang diutamakan yakni golongan fakir miskin, penyandang cacat dan masyarakat pra-sejahtera yang berada di Kota Makassar. Sehingga hal tersebut sejalan dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 bahwa zakat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶⁷ Adapun program-program penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar dari hasil wawancara dan pengamatan diantaranya yakni :

a. Program Pembinaan Keagamaan

Program ini meliputi bantuan rumah ibadah/mesjid, bantuan guru TPA/Mengaji, Bantuan Muallaf, dan Pelatihan pengurusan Jenazah Muslim. Bantuan tersebut masing-masing diberikan kepada guru mengaji sebesar Rp 350.000 dengan dibagikan kepada guru mengaji setiap kelurahan 4 orang. Sedangkan muallaf mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 / orang.⁶⁸

b. Pengembangan Ekonomi dan SDM

Program ini merupakan penyaluran dana zakat dalam memberikan bantuan insentif finansial bagi mustahiq serta memberikan bantuan pemberdayaan mustahiq agar meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan program ini berupa bantuan langsung kepada mustahiq secara tunai hingga program pelatihan-pelatihan. Bantuan

⁶⁶Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS.

⁶⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 8.

⁶⁸Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati, SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS.

langsung disalurkan langsung kepada fakir miskin dan pra-sejahtera di 14 kecamatan Kota Makassar. Masing-masing setiap kelurahan mengusulkan warga yang layak menerima sebanyak 6 warga pra sejahtera dengan bantuan sebesar Rp 350.000. Pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut berupa pelatihan menjahit, pelatihan kursus las, AC, instalasi listrik hingga pelatihan pengembangan wirausaha.⁶⁹

c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Program bantuan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar meliputi bantuan beasiswa pendidikan secara penuh dan insidentil. Pemberian secara penuh hanya diberikan kepada tingkat SMA dan mahasiswa S1. Sedangkan bantuan insidentil meliputi bantuan penyelesaian bagi mahasiswa S1 sebesar Rp 300.000, S2 sebesar Rp 500.000, dan S3 sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan bantuan kesehatan meliputi bantuan pengobatan gratis.⁷⁰ Dari pengamatan penulis, BAZNAS sempat mengadakan sunatan massal pada hari Sabtu 13 Juni 2015 di Kantor BAZNAS Kota Makassar secara gratis.

d. Bidang Sosial

Program bidang sosial mencakup kegiatan berbasis sosial yang berguna dalam membantu keperluan sosial masyarakat miskin yang memerlukan bantuan. Diantaranya yakni, bantuan sosial kepada fakir miskin, muallaf, bantuan bencana alam yang bersifat insidentil, hingga pelayanan mobil ambulance.

e. Penyaluran Dana Amil

⁶⁹Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS.

⁷⁰Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS.

Penyaluran dana zakat kepada amil merupakan penyaluran dana zakat yang menjadi hak amil sebagai pengelola dana zakat yang secara syariah memperoleh hak sebagai salah satu diantara 8 asnaf yang berhak. Berdasarkan kebijakan BAZNAS Kota Makassar, bagian amil sebesar 8% untuk UPZ dan 4,5% untuk pengelola di BAZNAS.⁷¹

B. Praktik Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar

Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada muzakki. Hal ini berkaitan dengan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Dana tersebut yang terkumpul berasal dari muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzakki.

1. Tahap Pencatatan

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang kemudian dicatat secara harian (periodik). Siklus pencatatan harian tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar tidak memiliki jurnal pencatatan yang khusus.

⁷¹Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati, SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS.

Akan tetapi, untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat berupa laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Makassar menggunakan buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.

Tabel buku kas tersebut terbagi kedalam tiga pos buku kas berupa buku kas zakat, buku kas infaq haji, dan buku kas infaq PNS. Klasifikasi tersebut berdasarkan kepada sumber dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Makassar. Tabel tersebut berisi tanggal, transaksi, kode, dan saldo. Berikut ilustrasi sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 31/07/2013 Tercatat dari buku kas zakat telah terjadi penerimaan dana zakat dari Prof. Dr. H. Ali Parman sebesar Rp 1.000.000, dan tanggal yang sama juga menyalurkan bantuan guru mengaji TPA ke Mesjid Al-Mujtahidah AN Hasniati, TPA Mesjid Haqqul Yakin AN Hasriadi masing masing senilai Rp 350.000/orang

Tgl	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Kode	Saldo
31/07/13	Prof. Dr. H. Ali Parman	1.000.000			
31/07/13	Bant. Guru mengaji TPA AN Hasniati		350.000	1.1	
31/07/13	Bant. Guru mengaji TPA AN Hasriadi		350.000	1.1	
	SALDO				Rp 300.000

Tabel 4.1. Contoh format buku kas dana zakat
Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013

ALAUDDIN
M A K A S S A R

- b. Pada tanggal 06 Desember 2013 BAZNAS Kota Makassar menerima dana infaq dari UPTD Kec. Tamalanrea dan Panakkukang masing-masing sebesar Rp 3.500.000 dan Rp 4.000.000, di tanggal yang sama juga memberikan insentif kepada UPZ kec. Tamalanrea sebesar 1.680.000.

Tgl	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Kode	Saldo
06/12/13	UPTD Kec. Tamalanrea	3.500.000			
06/12/13	UPTD Kec. Panakkukang	4.000.000			
06/12/13	Insentif UPZ kec. Tamalanrea		1.680.000	0.5	
	SALDO				Rp 5.820.000

Tabel 4.2 Contoh format buku kas infaq PNS

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013

Selengkapnya buku kas dari masing-masing pos penerimaan dapat dilihat di lampiran gambar 4.2, 4.3, dan 4.4. Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakat ke dalam 3 pos penerimaan yakni:

- 1) Dana Zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseorang maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) maupun dari transfer via bank yang telah diterima. Penggolongan dana zakat bagi penerimaan dana zakat yang disalurkan kepada BAZNAS Kota Makassar bila telah mencapai nisabnya.

- 2) Dana Infaq Haji, merupakan dana infaq yang dipungut dan diterima dari jemaah haji dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan setiap jemaah. Meskipun dalam keterangan bendahara BAZNAS Kota Makassar bahwa infaq haji dipungut sesuai dengan SK edaran walikota Makassar yang menyatakan besaran infaq haji sebesar Rp 350.000/jemaah namun bisa saja infaq tersebut diterima melebihi ketentuan tersebut.
- 3) Dana Infaq PNS, merupakan dana infaq yang berasal dari PNS Kota Makassar yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah didirikan di setiap SKPD, sekolah, maupun lembaga pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Dana infaq ini dipisahkan dari dana zakat karena berdasarkan keterangan dari Bapak Katjong Tahir, SH bahwa dari surat himbauan walikota Makassar tidak semua golongan PNS yang dipungut iuran zakat telah mencapai nisabnya, sehingga hanya beberapa golongan PNS saja yang dikategorikan sebagai dana zakat khususnya golongan IV dan jumlah tersebut tidak banyak hanya segolongan kecil.⁷² Bila mengacu kepada Surat Edaran Walikota Makassar per tanggal 17 Mei 2010 ditetapkan pada poin b bahwa besaran infaq bagi pegawai sesuai dengan golongannya yakni, golongan IV Rp 20.000/bulan, golongan III Rp 10.000/bulan, golongan II Rp 5.000/bulan, dan golongan I Rp 2.000/bulan.⁷³

Bila melihat dari proses pencatatan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Makassar, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 3 bagian yakni Kas dana Zakat, Kas dana Infaq Haji, dan Kas dana Infaq PNS. Model sistem pencatatan tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (fund accounting) yang

⁷²Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS.

⁷³ Arsip BAZNAS, Surat Edaran Walikota Makassar tertanggal 17 Mei 2010.

merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam hal ini, pencatatan BAZNAS Kota Makassar membagi dana kas zakat menurut sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infaq haji, dan dana kas infaq PNS.

2. Tahap Penggolongan

Setelah melakukan pencatatan dana zakat melalui buku kas sesuai dengan sumber penerimaan. Proses selanjutnya untuk mengetahui secara rekapitulatif jumlah penyaluran dana zakat kepada mustahiq, maka langkah selanjutnya yakni melakukan penggolongan pendistribusian penyaluran zakat. Sedangkan menurut penyaluran dananya dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan jenis program penyaluran masing-masing yakni, program keagamaan, program pendidikan dan kesehatan, program pengembangan ekonomi dan SDM, dan program bidang sosial ditambah dana bagian amil yang disalurkan sesuai dengan hak amil.

Sehingga selain mencatat langsung semua penerimaan dan pengeluaran dana zakat melalui ketiga pos dana zakat tersebut di atas, pembukuan BAZNAS juga mencatat rekapitulasi pendistribusian dana zakat dari masing-masing pos dana tersebut dengan kode sesuai dengan pos program pendistribusian yakni terdapat 4 program pendistribusian dana zakat ditambah dengan pengeluaran dana zakat bagian amil untuk biaya operasional dan ujah/fee yang menjadi hak amil. Berikut masing masing pos pendistribusian tersebut :

Kode 1.1 = Pendistribusian Bidang Keagamaan

Kode 1.2 = Pendistribusian Bidang Pengembangan Ekonomi dan SDM

Kode 1.3 = Pendistribusian Bidang Pendidikan dan Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Kode 1.4 = Pendistribusian Bidang Sosial

Kode 1.5 = Pedistribusian Bagian Amil dan Operasional

Pencatatan pendistribusian dana zakat sesuai dengan klasifikasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang dikelola melalui program-program penyaluran zakat yang telah diprogramkan oleh BAZNAS dari berbagai macam klasifikasi program kepada para mustahiq. Klasifikasi tersebut juga direkapitulasi dengan seluruh pendistribusian di setiap program sehingga akan muncul total pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS di setiap program penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar selama setahun.

3. Tahap Pelaporan

Setelah penggolongan penyaluran distribusi zakat sesuai dengan program penyaluran BAZNAS, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan pengelolaan dana zakat secara rekapitulatif sesuai dengan pembagian dana kas zakat, dana kas infaq haji, dan dana infaq PNS. Selengkapnya terlihat dalam lampiran 4.5. Keseluruhan proses pencatatan tersebut berakhir dengan laporan pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Makassar yang berupa laporan tahunan yang mencakup dana tahun sebelumnya ditambahkan dengan total dana tahun berjalan yang telah diterima hingga dikurangkan dengan proses penyaluran dana yang terperinci ke dalam 4 program ditambah bagian amil dan operasional BAZNAS Kota Makassar. Sehingga akan muncul saldo akhir dana zakat di akhir tahun. Selengkapnya format laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah dapat dilihat sebagai contoh pada lampiran 4.6.

Dari proses pencatatan dan tampilan penyajian laporan pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar masih tergolong sangat sederhana dan masih menggunakan model single entry dimana ketika terjadi penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah akan langsung tercatat pada kolom penerimaan dan secara otomatis menambah saldo dana zakat dan sebaliknya pula ketika terjadi penyaluran dana zakat akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat dan secara otomatis akan mengurangi saldo dana zakat. Cara sederhana yang digunakan oleh BAZNAS tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi cash base yakni : $\text{Perubahan kas} = \text{Pemasukan} - \text{Pengeluaran}$.

Dalam hal ini, metode pencatatan tersebut yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi dan peristiwa tersebut menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi dan peristiwa tersebut tidak dicatat. Sehingga case basis memiliki keunggulan karena dapat menceminkan pengeluaran yang aktua, riil, dan objektif.⁷⁴ Selanjutnya dengan mengacu kepada seluruh pencatatan tersebut akan menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah tahunan oleh BAZNAS Kota Makassar.

Pencatatan dengan sistem single entry seperti yang diterapkan dalam model pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem pencatatan single entry atau dikenal dengan sistem tata buku tunggal memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan keuangan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit untuk dikontrol. Oleh

⁷⁴ Hendra F Santoso Akuntansi Anggaran. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 233

karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut juga dengan sistem double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi (Halim:2008).⁷⁵ Sehingga dalam tahap akhir pelaporan, BAZNAS Kota Makassar hanya menyajikan laporan perubahan dana zakat secara rekapitulatif.

C. Kajian Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infaq/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh penggunanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Maka, sudah sepantasnya sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dapat dilaporkan secara transparan. Sebagaimana menurut Harahap (1997) bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan.⁷⁶ Sehingga kepercayaan atas kinerja pengelolaan dana zakat dapat tumbuh dalam diri muzakki sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.

⁷⁵ Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta Salemba 4, h. 43.

⁷⁶ Harahap dalam Iwan Triyuwono. Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori. (Cet ke-III; Jakarta: Rajawali Press 2012) , h. 29.

Idealnya bila merujuk pada PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi : Laporan Neraca, Laporan perubahan dana, laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelolaan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah masih banyak yang belum sesuai.

Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas harian sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, infaq haji, atau infaq PNS), dimana dalam pencatatan tersebut sebagaimana yang ditampilkan pada lampiran jurnal BAZNAS Kota Makassar hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan single entry, ketika terjadi penerimaan zakat dan infaq/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah maka pencatatannya sebagai berikut :

Penerimaan Dana Zakat

Kas-Dana Zakat	xxx
----------------	-----

Dana Zakat	xxx
------------	-----

Penyaluran Dana Zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Dana Zakat

xxx

Kas-Dana Zakat

xxx

Dari jurnal tersebut, bahwa penerimaan kas dana zakat dan infaq/sedekah akan menambah dana zakat dan infaq/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infaq/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan double entry, dimana transaksi dicatat dua kali pada debet dan kredit. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar hanya menerapkan metode single entry, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol.⁷⁷

Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar hanya laporan perubahan dana zakat dan infaq/sedekah. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima jenis yaitu : Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat kita kaji dalam isi PSAK 109 dengan membandingkan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

1. Pengakuan dan Pengukuran

⁷⁷ Hendra F Santoso Akuntansi Anggaran. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 234.

a. Zakat

1) Pengakuan Awal

Secara konseptual pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral laporan keuangan. Dalam PSAK 109 poin 9, disebutkan bahwa pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu metode cash base yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat dan infaq/sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan secara langsung sebagai kas. Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa dari sisi pengakuan dana zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, Akan tetapi sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan single entry.

Pernyataan 10 PSAK 109 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini telah tercermin dalam buku kas dana zakat BAZNAS Kota Makassar yang mengakui penerimaan dana zakat sebagai penambah dana zakat. Khususnya dana zakat yang langsung diterima umumnya berasal dari PNS di lingkungan Kota Makassar maupun zakat badan dan pribadi yang telah memenuhi nisab. Berdasarkan pada himbauan walikota Makassar Nomor 451.12/33/S.Edar/Kesra/V/2010 tercantum dengan jelas pada poin a menetapkan bahwa Pegawai yang berpenghasilan minimal Rp 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)/ bulan dapat melaksanakan kewajibannya membayar zakat

profesi sebesar 2,5%/bulan dan disetorkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing unit kerja.

Sedangkan pada poin 10(b) ditambahkan bahwa jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Dari buku kas BAZNAS Kota Makassar tidak tercantum aset non-kas yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Makassar. Pada pernyataan (12) PSAK 109, Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian non amil. Di pencatatan BAZNAS Kota Makassar memberikan gambaran perincian dana amil yang dikelola oleh BAZNAS dengan kode 1.5, sedangkan dana non-amil yang disalurkan juga dirincikan sesuai kebijakan program penyaluran yang telah disepakati. Artinya, secara umum BAZNAS Kota Makassar telah mengakui pembagian dana zakat yang diterima menjadi hak amil dan sebagiannya akan disalurkan kepada mustahiq dan diakui sebagai dana non-amil.

Pada pernyataan (13) PSAK 109 menyatakan bahwa jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Dari kebijakan pengelola BAZNAZ Kota Makassar, pengakuan dana amil ditentukan dengan presentase sebesar 8% untuk UPZ dan 4,5% untuk amil yang berada di BAZNAS sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan mustahiq yang lain disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan BAZNAS. Pada pernyataan 14 PSAK 109 menyatakan bahwa, jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Dari kebijakan amil yang telah menunjukkan adanya Unit pengumpul zakat (UPZ) dari berbagai instansi

pemerintahan di Kota Makassar, mereka mendapatkan ujah/fee yang sesuai dengan kebijakan BAZNAS sebesar 4,5% dari dana zakat dicatat sebagai di laporan keuangan BAZNAS sebagai dana amil dan akan menambah dana amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana. Umumnya dana yang diterima oleh BAZNAS Kota Makassar berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah yang diterima. Sementara itu, penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah berupa aset non-kas pada BAZNAS Kota Makassar tidak terdapat dalam pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar. Seperti pada pengukuran setelah pengakuan awal pernyataan PSAK 109 (15) menyatakan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

3) Penyaluran Zakat

Berdasarkan pada PSAK 109 poin 17 menyatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.⁷⁸ Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar disalurkan kepada mustahiq dengan kebijakan program juga diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Hal ini terlihat dari pencatatan

⁷⁸Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 04.

buku kas dana zakat dan infaq/sedekah yang mencatat pengeluaran dana zakat disisi pengeluaran yang secara langsung mengurangi dana saldo zakat. Sementara dari sisi penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset non-kas tidak terdapat pada BAZNAS Kota Makassar karena dari keterangan bendahara BAZNAS bahwa amil hanya menerima dana zakat tunai, namun bila menerima zakat non kas juga akan dicatat sesuai dengan harga aset tersebut.

b. Infaq/Sedekah

1) Pengakuan Awal

Sementara pengakuan awal penerimaan dana infaq/sedekah yakni pada poin 18 PSAK 109 yang menyatakan bahwa infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar :

- (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar hanya mengakui jumlah dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima seperti pengakuan penerimaan dana zakat yang juga menggunakan sistem pencatatan cash basis baik dana infaq/sedekah terikat maupun tidak terikat. Umumnya dana infaq/sedekah yang diterima merupakan dana zakat yang tidak terikat dan tercatat dalam dana kas infaq haji yang dipungut kepada jamaah haji Kota Makassar sebesar Rp 350.000/jamaah sesuai dengan SK Edaran Walikota Makassar dan Dana kas Infaq PNS yang berasal dari PNS lingkup Kota Makassar yang dihimpun melalui UPZ masing-masing instansi dan ditentukan besarnya sesuai dengan SK Edaran Walikota Makassar nomor: 451.12/33/S,Edar/Kesra/V/2010. Besaran infaq bagi pegawai sesuai dengan

golongannya yakni, golongan IV Rp 20.000/bulan, golongan III Rp 10.000/bulan, golongan II Rp 5.000/bulan, dan golongan I Rp 2.000/bulan bila telah terkumpul maka UPZ akan menyetorkan kepada bendahara BAZNAS untuk dicatat dan dikelola sesuai dengan kebijakan penyaluran BAZNAS Kota Makassar.

Sedangkan pada poin (b) penerimaan aset non-kas yang diterima di BAZNAS Kota Makassar, bendahara BAZNAS menguraikan bahwa infaq/sedekah muqayyad (terikat) sesuai dengan ikrar donatur pernah dan masih dilaksanakan oleh BAZNAS. Salah satunya bentuk kerjasama program kesehatan BAZNAS yakni operasi katarak bagi warga kurang mampu. Dalam program tersebut, BAZNAS menanggung bantuan tersebut dengan menanggung biaya operasi 5 mata sedangkan optik Inayah memberikan bantuan infaq/sedekah dengan menanggung 2 mata. Seharusnya tanggungan berupa pelayanan kesehatan oleh optik Inayah tersebut dapat diakui sebagai infaq/sedekah terikat dalam bentuk non-kas. Namun dari pencatatan BAZNAS hanya mencatat sejumlah nominal yang ditanggung oleh BAZNAS.⁷⁹

Pengakuan dana infaq/sedekah yang diatur oleh PSAK 109 selanjutnya pada poin 20 yang menyatakan bahwa Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Seperti dalam pengakuan dana zakat, pengakuan dana infaq/sedekah di BAZNAS juga membagi dana infaq/sedekah sebagai bagian dana amil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan bagian penerima infaq/sedekah juga diakui sesuai dengan kebijakan BAZNAS yakni melalui program penyaluran. Sedangkan poin 21 menyatakan bahwa penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan

⁷⁹Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara BAZNAS Kota Makassar) tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor BAZNAS.

kebijakan amil. Kebijakan penentuan jumlah penerima infaq/sedekah telah diatur dalam program penyaluran sesuai dengan peruntukannya. Misalnya kebijakan jumlah penerima infaq/sedekah bagi muallaf sebesar Rp 500.000/orang. Penentuan lain soal jumlah penerima infaq fakir miskin sebesar Rp 350.000/orang dengan jumlah masing-masing 6 orang di setiap kelurahan. Hal lain berkaitan dengan penentuan kebijakan jumlah penerima infaq/sedekah di BAZNAS sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pengukuran setelah pengakuan Awal

Pernyataan poin 22 PSAK 109 menyatakan, infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Penerimaan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar berupa kas dalam bentuk tunai. Adapun aset non kas lancar maupun tidak lancar belum pernah diterima oleh BAZNAS Kota Makassar. Pada poin 23 PSAK 109 dijelaskan lebih lanjut bahwa aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau aset pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Dari pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar tidak pernah menerima aset tidak lancar. Akan tetapi BAZNAS Kota Makassar memiliki aset tidak lancar dari penerimaan dana infaq yang dibeli untuk pelayanan sosial masyarakat yakni mobil ambulance. Berdasarkan laporan auditor independen bahwa BAZNAS sendiri mencatat pembelian aset maupun inventaris secara langsung di laporan keuangan sesuai dengan harga perolehannya dan tidak melakukan penyusutan atas inventaris kantor yang dimiliki. Pencatatan laporan keuangan

BAZNAS Kota Makassar hanya menunjukkan penyaluran dana operasional untuk perbaikan dan perawatan inventaris mobil ambulance dan inventaris lain sesuai dengan harga dan nilai nominal dalam bentuk kas. Contoh yang ditunjukkan dalam laporan keuangan Januari tahun 2013 yakni biaya servis 2 komputer sebesar Rp 1.739.000, biaya perbaikan mobil ambulance sebesar Rp 400.000, penggantian subbreaker depan ambulance sebesar Rp 270.000.⁸⁰

Adapun pada poin 28 PSAK 109 menyatakan bahwa dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.⁸¹ Dalam kebijakan BAZNAS Kota Makassar belum memutuskan untuk mengelola dana infaq/sedekah secara produktif. Hanya program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS untuk menyokong mustahiq agar dapat menaikkan taraf hidupnya. Misalnya program bantuan pelatihan menjahit, kursus las, pelatihan keirusahaan, dan bantuan modal usaha bagi warga yang dianggap layak untuk menerima.

3) Penyaluran infaq/Sedekah

Pernyataan poin 29 PSAK 109 menyatakan penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:

- (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Dari pernyataan tersebut, bila melihat dari pencatatan penyaluran dana kas infaq haji maupun dana kas infaq PNS BAZNAS Kota Makassar penyaluran zakat kepada

⁸⁰Arsip BAZNAS Kota Makassar, Laporan Tahunan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013.

⁸¹Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 06.

mustahiq diserahkan dengan berbagai nominal jumlah sesuai dengan kebijakan BAZNAS Kota Makassar. Misalnya, bantuan langsung fakir miskin dan pra sejahtera sebesar Rp 350.000 dengan pembagian kepada 6 orang/kelurahan dicatat sesuai dengan nominal kas yang dikeluarkan kepada mustahiq. Adapun aset yang diserahkan kepada mustahiq berupa sembako tetapi dicatat sebagai pengeluaran kas karena BAZNAS Kota Makassar hingga saat ini masih belum menerima dan mengelola aset non-kas secara langsung. Namun, dari keterangan BAZNAS Kota Makassar pernah bekerjasama dengan radio Gamasi untuk menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin sedangkan pihak radio Gamasi memberikan bantuan berupa sembako. Seharusnya, bantuan sembako dalam program kerjasama tersebut oleh Radio Gamasi dapat dicatat dan diakui sebagai dana infaq/sedekah barang makanan dalam bentuk aset non kas yang disalurkan secara langsung. Akan tetapi yang tercatat dalam laporan keuangan BAZNAS Hanya mencatat dana zakat yang disalurkan secara tunai oleh BAZNAS Kota Makassar.⁸²

c. Dana Non Halal

Dalam pernyataan PSAK 109 poin 32 menyatakan bahwa penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Dari keterangan bendahara BAZNAS Kota Makassar bahwa dari transaksi penerimaan zakat juga terdapat pendapatan dari bunga bank dan akan dicatat di laporan keuangan. Namun, dari pencatatan yang diperoleh di BAZNAS Kota Makassar

⁸²Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara BAZNAS Kota Makassar) tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor BAZNAS.

hanya langsung mencatat sebagai transaksi tunai dari bank tanpa memisahkan nominal dari bagian dana non halal.

2. Pengungkapan dan Penyajian

Dari sisi pengungkapan yang terdapat dalam PSAK 109 poin 35(a) yakni, mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. Poin 36(b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Poin 35(c) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dana yang diterima langsung mustahiq.⁸³

Pengukuran tersebut yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam konteks pengukuran, kebijakan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima telah diterapkan Oleh BAZNAS Kota Makassar. Skala prioritas penyaluran BAZNAS Kota Makassar ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dengan menyesuaikan kondisi masyarakat kota Makassar. Prioritas utama penyaluran kepada faqir miskin dan masyarakat pra sejahtera yang terdapat di setiap kelurahan. Penyaluran juga diprioritaskan kepada penyandang cacat yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan. Fii Sabilillah yang berjuang di jalan Allah dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat juga diberikan kepada guru mengaji kampung yang terdapat di setiap kelurahan di Kota Makassar. Penerima lain adalah muallaf yang baru masuk Islam dan hak amil dengan presentase yang telah sesuai dengan syariah.

⁸³Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 08

Begitupun kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dana amil yang menjadi hak amil diberikan sebesar 8% kepada UPZ dan 4,5% untuk dana operasional amil yang berada di BAZNAS Kota Makassar. Namun presentase tersebut saat ini belum ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan yang diterapkan BAZNAS Kota Makassar saat ini tidak memiliki catatan atas laporan keuangan.

Sementara itu, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan telah ditampilkan dalam laporan pertanggungjawaban dana zakat Oleh BAZNAS Kota Makassar. Secara nominal ditampilkan biaya operasional, biaya ATK, dan biaya inventaris yang menunjang aktivitas BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Sedangkan jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahiq dapat dilihat pada rekapitulasi penyaluran dana zakat dari program sosial, program ekonomi dan SDM, program kesehatan dan pendidikan, dan program keagamaan yang masing-masing menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan tujuan program penyaluran tersebut.

Pengungkapan dana infaq/sedekah juga diatur dalam PSAK 109. Pada poin 36(b) menyatakan bahwa kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Pengungkapan terkait dana infaq/sedekah tersebut perlakuannya sama dengan pengungkapan dana zakat pada poin 35(b) yang telah ditentukan dalam kebijakan BAZNAS dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengungkapan dana infaq/sedekah poin 36(g) yang menyatakan bahwa rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang

diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah.⁸⁴ Pengungkapan tersebut perlakuannya sama dengan pengakuan pada dana zakat yakni ditampilkan pada laporan pertanggungjawaban BAZNAS. Secara nominal ditampilkan biaya operasional, biaya ATK, dan biaya inventaris yang menunjang aktivitas BAZNAS. Beban pengelolaan tersebut lalu direkapitulasi jumlah nominalnya dan termasuk dalam bagian amil pada laporan pertanggungjawaban Tahunan BAZNAS. Sedangkan jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahiq dapat dilihat pada rekapitulasi penyaluran dana infaq/sedekah haji dan infaq PNS dari program sosial, program ekonomi dan SDM, program kesehatan dan pendidikan, dan program keagamaan yang masing-masing menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan tujuan program penyaluran tersebut.

Adapun dalam PSAK 109 poin 34 menyatakan penyajian Amil menyajikan dana zakat, dan infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).⁸⁵ Sementara penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja amil dalam kapasitasnya menarik dan mengumpulkan dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya bagi mustahiq.

Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar menyajikan dana zakat, dan infaq/sedekah, dan dana Amil secara terpisah dalam melalui buku kas dan laporan rekapitulasi program penyaluran sesuai program namun belum mencatat

⁸⁴Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 08

⁸⁵Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 2008, h. 07.

dana non halal. Sejah ini pemahaman SDM BAZNAS Kota Makassar terkait penerapan PSAK 109 masih minim sehingga pembukuannya masih menggunakan sistem sederhana dan belum sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan dalam laporan auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.⁸⁶ Akan tetapi minimnya sosialisasi penerapan PSAK 109 dan penerapan UU 23 Tahun 2011 yang baru akan diterapkan di tahun 2015 sehingga penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Makassar belum dilaksanakan. Bila mengacu kepada PSAK 109 bentuk laporan keuangan sesuai dengan ilustrasi di bawah ini:

Ilustrasi I

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)			
BAZ (XXX)			
Per 31 Desember 2XX2			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	
Aset tidak lancar		Imbalan kerja jangka panjang	xxx

⁸⁶Arsip BAZNAS Kota Makassar, Laporan Auditor Independen Mansyur Sain dan Rekan, No:01-BAZ/AU/KAP-MS/XII/2011

Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan dana	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah)

Ilustrasi II

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>

Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah)

Ilustrasi III

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)		-	xxx
Dana infak/ sedekah – ase kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah)

Laporan Arus Kas

Entitas amal menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

Catatan atas Laporan Keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, dalam praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar menggunakan beberapa sarana penghimpunan, salah satunya adalah membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi pemerintahan di Kota Makassar. Kata khudz merupakan kalimat perintah yang ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini amil zakat, untuk menarik zakat dari para muzakki. Ungkapan tersebut menunjukkan sebuah keharusan/kewajiban bagi penguasa sebagai tugas yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan operasional zakat dengan baik.

Kedua, penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar kepada mustahiq telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana firman Allah swt dalam QS At-Taubah/9:60. Dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan disesuaikan dengan prioritas asnaf yang sangat membutuhkan yakni, masyarakat miskin dan pra-sejahtera yang ada di Kota Makassar. Selain itu, model penyaluran sesuai dengan kebijakan BAZNAS tidak terbatas pada penyaluran langsung kepada mustahiq. Akan tetapi, model penyaluran dilakukan dengan kebijakan berbagai program penyaluran

yang terbagi kepada 4 bidang yakni, bidang keagamaan, bidang ekonomi dan SDM, bidang pendidikan dan kesehatan, dan bidang sosial. Diharapkan melalui program-program tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerimanya.

Ketiga, Pengakuan terhadap dana zakat dan infaq/sedekah oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan berdasarkan dengan nilai dasar tunai (cash basis) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau dikeluarkan. Sistem pencatatan yang diterapkan juga masih menggunakan sistem pencatatan single entry yang sangat sederhana. Sehingga laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang dihasilkan hanya ada satu jenis laporan keuangan yakni laporan perubahan dana. Idealnya sesuai dengan PSAK 109, ada 5 jenis laporan keuangan yang mesti dibuat oleh lembaga amil zakat yakni: Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga secara umum BAZNAS Kota Makassar masih belum menerapkan PSAK 109 secara utuh.

B. Saran

1. Penerapan akuntansi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar harus dibenahi menjadi lebih baik lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan akuntansi untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang terkait serta sesuai dengan prinsip syariah. Hingga kini BAZNAS Kota Makassar masih menggunakan sistem pencatatan single entry yang tergolong masing sangat sederhana. Ke depannya BAZNAS sebaiknya menerapkan sistem pencatatan double entry

dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan sistem ini akan mempermudah BAZNAS Kota Makassar dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir periode.

2. Melihat proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang langsung dikelola oleh Bendahara BAZNAS. Maka sebaiknya ke depannya BAZNAS Kota Makassar perlu mengangkat seorang akuntan yang ditugaskan khusus untuk menyusun laporan keuangan BAZNAS yang sesuai dengan PSAK 109 dan membenahi proses pencatatan laporan keuangan.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Konseptual.....	45
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	62





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR

Sekretariat : Jln. Teduh Bersinar No. 5 telp. (0411) 8215672

<http://www.bazmakassar.blogspot.com>

Makassar, 10 Januari 2014

Nomor : 08 /BAZNAS-MKS/II/2014
Lamp : 1 Berkas
Perihal: Laporan Tahunan BAZNAS
Kota Makassar

Kepada
Yth. Bapak Walikota Kota Makassar
Bapak Ketua DPRD Kota Makassar
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Walikota Makassar No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Makassar, Badan Amil Zakat Kota Makassar berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Kota Makassar Kepada Walikota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini terlampir dilaporkan Kepada Bapak Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat, Infak Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Tahun 2013.

Demikian disampaikan Kepada Bapak untuk seperlunya.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar,
Ketua


Drs. H. ABD. LATIEF JUSUF

Tembusan :


1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sul - Sel di Makassar
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di Makassar
3. Ketua Komisi Pengawas BAZNAS Kota Makassar
4. Pertinggal

Lampiran 4.2

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
BUKU KAS ZAKAT TAHUN 2013 (JURNAL UMUM)

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KODE	SALDO
1		JUMLAH TAHUN 2012	Rp 65,694,400			Rp 65,694,400
2	4-Jan-13	ZAKAT CV PENA MANDIRI	Rp 500,000			Rp 66,194,400
3	14-Mar-13	HI ANDI HASNAH PAGE	Rp 1,000,000			Rp 67,194,400
4	28-Mar-13	upz KEMENTERIAN AGAMA MKS	Rp 4,893,500			Rp 72,092,900
5	29-Apr-13	ZAKAT LEWAT BPD SUL SEL29-4-2013	Rp 1,640,000			Rp 73,732,900
6	31-May-13	UPS KEMENTERIAN AGAMA MKS	Rp 7,348,500			Rp 81,081,400
7	31-May-13	UPS KEMENTERIAN AGAMA MKS	Rp 7,348,500			Rp 88,429,900
8	12/7/2013	DRS H ABD LATIEF JUSUF	Rp 15,000,000			Rp 103,429,900
9	7/24/2013	HI. ANDI WAWO	1,250,000			Rp 104,679,900
10	7/24/2013	PROF DR H ARIFUDDIN AHMAD	750,000			Rp 105,429,900
11	7/29/2013	BANTUAN PENYANDANG CACAT 100.		35,000,000	1.2	Rp 70,429,900
12	7/30/2013	DRS K.H MUHAMMAD AHMAD	2,500,000			Rp 72,929,900
13	7/31/2013	BANTUAN MUALLAF 23 ORANG		11,500,000	1.1	Rp 61,429,900
14	7/31/2013	PROF DR H.ALI PARMAN	1,000,000			Rp 62,429,900
15	7/31/2013	BANT GURU TPA AN MUJTAHIDAH AN. HASNIATI		350,000	1.1	Rp 62,079,900
16	7/31/2013	BANT GURU TPA HAQQUL YAKIN AN. HASRIADI		350,000	1.1	Rp 61,729,900
17	7/31/2013	BANT GURU TPA HAQQULYAKIN AN. AKBAR		350,000	1.1	Rp 61,379,900
18	8/2/2013	HADIJAH TAHIR	1,000,000			Rp 62,379,900
19	8/2/2013	HERLINA TAHIR	1,000,000			Rp 63,379,900
20	8/2/2013	MULIATI TAHIR	2,000,000			Rp 65,379,900
21	8/2/2013	RAHMATIAH JL SKARDA I NO 14	500,000			Rp 65,879,900
22	8/14/2013	MESIJD NURUL MU,MININ KARUWISI UTR	500,000			Rp 66,379,900
23	8/14/2013	H ABU NAIM SAANRE BA	375,000			Rp 66,754,900
24	8/14/2013	INSENTIF UPZ MESIJD NURUL MU,MININ		40,000	1.5	Rp 66,714,900
25	8/18/2013	ZAKAT PERCETAKAN(DARMA)	2,000,000			Rp 68,714,900
26	12/4/2013	UPZ KEMEN NTERIAN AGAMA MKS	5,000,000			Rp 73,714,900
27	12/4/2013	UPZ KEMEN NTERIAN AGAMA MKS	5,000,000			Rp 78,714,900
28	12/4/2013	INSENTIF UPZ KEMENTERIAN AGAMA		2,207,600	1.5	Rp 76,507,300
29	12/16/2013	upz KEMENTERIAN AGAMA MKS	5,000,000			Rp 81,507,300
		JUMLAH BULAN BERJALAN	131,304,900	49,797,600		
		JUMLAH PER TAHUN 2013	Rp 65,610,500			
		SALDO ZAKAT TAHUN 2013				Rp 81,507,300

MENGETAHUI
KETUA BAZNAS KOTA MAKASSAR


DRS. H. ABD. LATIEF JUSUF

MAKASSAR, DESEMBER 2013

BENDAHARA


H. KATJONG TAHIR, SH

M A K A S S A R

Lampiran 4.3

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
BUKU KAS INFAK HAJI TAHUN 2013 (JURNAL UMUM)

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KODE	SALDO
1		SALDO TAHUN LALU	Rp 106,602,450			Rp 106,602,450
2	15-Feb-13	NASI BUNGKUS UNTUK LEMBUR		Rp 60,000	1.5	Rp 106,542,450
3	15-Feb-13	NASI BUNGKUS TGL 13-2-2013		Rp 240,750	1.5	Rp 106,301,700
4	16-Feb-13	AIR MINUM JS		Rp 13,900	1.5	Rp 106,288,700
5	16-Feb-13	FOTO COPY IATK		Rp 19,800	1.5	Rp 106,268,900
6	16-Feb-13	FOTO COPY DAN JILID		Rp 79,400	1.5	Rp 106,189,500
7	16-Feb-13	FOTO COPY		Rp 15,000	1.5	Rp 106,174,500
8	16-Feb-13	FOTO COPY DAN JILID		Rp 309,600	1.5	Rp 105,864,900
9	16-Feb-13	FOTO COPY		Rp 8,800	1.5	Rp 105,856,100
10	16-Feb-13	BBM TGL 16-2-2013		Rp 100,000	1.4	Rp 105,756,100
11	16-Feb-13	FOTO COPY KWITANSI U LAPORAN		Rp 250,000	1.5	Rp 105,506,100
12	7-May-13	INFAK HAJI	Rp 46,200,000			Rp 151,706,100
13	28-May-13	INFAK HAJI	Rp 35,350,000			Rp 187,056,100
14	29-May-13	INFAK HAJI	Rp 16,800,000			Rp 203,856,100
15	31-May-13	INFAK HAJI	Rp 7,000,000			Rp 210,856,100
16	31-May-13	INFAK HAJI	Rp 9,000,000			Rp 219,856,100
17	3-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 19,900,000			Rp 239,756,100
18	4-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 6,650,000			Rp 246,406,100
19	5-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 5,600,000			Rp 252,006,100
20	7-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 2,100,000			Rp 254,106,100
21	10-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 28,350,000			Rp 282,456,100
22	12-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 21,000,000			Rp 303,456,100
23	12-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 4,550,000			Rp 308,006,100
24	13-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 4,200,000			Rp 312,206,100
25	14-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 15,050,000			Rp 327,256,100
26	14-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 709,000			Rp 327,965,100
27	15-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 14,700,000			Rp 342,665,100
28	15-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 700,000			Rp 343,365,100
29	20-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 17,150,000			Rp 360,515,100
30	25-Jun-13	INFAK HAJI	Rp 5,600,000			Rp 366,115,100
31	3-Jul-13	INFAK HAJI	Rp 3,150,000			Rp 369,265,100
32	5-Jul-13	INFAK HAJI	Rp 1,400,000			Rp 370,665,100
33	15-Jul-13	FAKIR MISKIN/PRA SEJAHTRA DI KEC BIRING-KANAYA 42 ORG		Rp 14,700,000	1.2	Rp 355,965,100
34	15-Jul-13	FAKIR MISKIN/PRA SEJAHTRA DI KEC MAMAJANG 78 ORG		Rp 27,300,000	1.2	Rp 328,665,100
35	15-Jul-13	INFAK HAJI	Rp 12,950,000			Rp 341,615,100
36	16-Jul-13	FAKIR MISKIN 36 ORG DI KEC TAMALANREA		Rp 12,600,000	1.2	Rp 329,015,100
37	16-Jul-13	FAKIR MISKIN 54 ORG DI KEC MARISO		Rp 18,900,000	1.2	Rp 310,115,100
38	17-Jul-13	FAKIR MISKIN 38 ORG DI KEC MANGGALA		Rp 13,300,000	1.2	Rp 296,815,100
39	17-Jul-13	FAKIR MISKIN 60 ORG DI KEC UJUNG PANDANG		Rp 21,000,000	1.2	Rp 275,815,100
40	18-Jul-13	FAKIR MISKIN 66 ORG DI KEC PANAKKUKANG		Rp 23,100,000	1.2	Rp 252,715,100
41	18-Jul-13	FAKIR MISKIN 62 ORG DI KEC TAMALATE		Rp 21,700,000	1.2	Rp 231,015,100
42	22-Jul-13	FAKIR MISKIN 90 ORG DI KEC TALLO		Rp 31,500,000	1.2	Rp 199,515,100
43	22-Jul-13	FAKIR MISKIN 84 ORG DI KEC MAKASSAR		Rp 29,400,000	1.2	Rp 170,115,100
44	23-Jul-13	FAKIR MISKIN 72 ORG DI KEC BONTOLALA		Rp 25,200,000	1.2	Rp 144,915,100
45	23-Jul-13	FAKIR MISKIN 48 ORG DI KEC WAJO		Rp 16,800,000	1.2	Rp 128,115,100
46	24-Jul-13	FAKIR MISKIN 60 ORG DI KEC RAPPOCINI		Rp 21,000,000	1.2	Rp 107,115,100
47	24-Jul-13	FAKIR MISKIN 72 ORG DI KEC UJUNG TANAH		Rp 25,200,000	1.2	Rp 81,915,100
48	24-Jul-13	BIAYA OPERASIONAL AMU/PENGURUS		Rp 43,500,000	1.5	Rp 38,415,100
49	24-Jul-13	BIAYA OPERASIONAL TIM PENGUMPUL INFAK HAJI		Rp 17,300,000	1.5	Rp 21,115,100
50	27-Jul-13	TRANSPORT PANTI ASUHAN PADA ACARA		Rp 2,500,000	1.2	Rp 18,615,100
51	27-Jul-13	BUKA PUASA TGL 31-7-2013 DI BAZ MKS				
52	27-Jul-13	HARGA SEMBAKO UNTUK PANTI ASUHAN		Rp 1,655,000	1.2	Rp 16,960,100
53	27-Jul-13	INFAK HAJI	Rp 10,150,000			Rp 27,110,100
54	28-Aug-13	INFAK HAJI 14 ORANG	Rp 4,900,000			Rp 32,010,100
55	30-Sep-13	INFAK HAJI 2 ORANG	Rp 700,000			Rp 32,710,100
56	30-Sep-13	INFAK HAJI 3 ORANG	Rp 1,050,000			Rp 33,760,100
57	30-Sep-13	HARGA BUKU SAKU UNTUK CALON JAMA'AH		Rp 2,700,000		Rp 31,060,100
58		JUMLAH BULAN BERJALAN	Rp 400,602,450	Rp 370,451,350		
59		JUMLAH TAHUN 2013	Rp 293,900,900			
60		SALDO TAHUN 2013				Rp 30,051,100

(TERBILANG : TIGA PULUH JUTA LIMA PULUH SATU RIBU SERATUS RUPIAH)

WAKASSAR, DESEMBER 2013

BERKAS

BERKAS

Lampiran 4.4

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
BUKU KAS INFAK PNS TAHUN 2013 (JURNAL UMUM)**

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	kode	SALDO
	SALDO INFAK PNS 2012	Rp 132,059,556			Rp 132,059,556
8-Jan-13	SMP 22	Rp 8,792,000			Rp 140,851,556
8-Jan-13	PD TERMINAL	Rp 168,000			Rp 141,019,556
8-Jan-13	INSENTIF UPZ PD AIR MINUM 2012		Rp 2,437,520	0.5	Rp 138,581,636
8-Jan-13	INSENTIF UPS IPTD KEC TAMALATE 2012		Rp 2,099,700	0.5	Rp 136,487,436
8-Jan-13	TRANSPORT AMIL/PENGURUS PADA PENUTUPAN MENIAHT ANGK. VI		Rp 1,500,000	0.5	Rp 134,982,436
8-Jan-13	HONOR KA SEKRETARIAT BAZ DES 2012		Rp 750,000	0.5	Rp 134,232,436
8-Jan-13	HONOR STAF SEKRETARIAT(MISWAR) DES 2012		Rp 750,000	0.5	Rp 133,482,436
8-Jan-13	BAYAR TELEPON NOPEMBER 2012		Rp 455,294	0.5	Rp 133,027,142
8-Jan-13	BAYAR TELEPON DESEMBER 2012		Rp 375,616	0.5	Rp 132,651,526
8-Jan-13	BANT MUSAFIR AN HENDRA TAMBUNAN		Rp 500,000	0.5	Rp 132,151,526
8-Jan-13	BANT BEA SISWA TK SMA SEMESTER 3		Rp 17,250,000	0.3	Rp 114,901,526
8-Jan-13	BANT BEA SISWA S 1 SEMESTER VI		Rp 31,500,000	0.3	Rp 83,401,526
8-Jan-13	BANT PENY STUDY AN RISWANTONI RUSTAM		Rp 300,000	0.3	Rp 83,101,526
8-Jan-13	BANT PENY CATAT AN RONNI		Rp 500,000	0.2	Rp 82,601,526
8-Jan-13	BANT PEMB MESJID ALAMIN BITOA		Rp 1,000,000	0.1	Rp 81,601,526
8-Jan-13	BANT PEMB MESJID NURUL IHLAS PACERAKKAN		Rp 1,000,000	0.1	Rp 80,601,526
8-Jan-13	HARGA BERAS U BENCANA BANJIR		Rp 1,350,000	0.4	Rp 79,251,526
8-Jan-13	PD AIR MINUM	Rp 5,074,000			Rp 84,325,526
8-Jan-13	BIAYA PELATIHAN KEWIRTAUSAHAAN ANGK II		Rp 14,277,500	0.2	Rp 70,048,026
8-Jan-13	HARGA NASI DOS		Rp 96,000	0.5	Rp 69,952,026
8-Jan-13	INSENTIF LPZ SATPOL PP JULI DES 2012		Rp 261,680	0.5	Rp 69,690,346
8-Jan-13	FOTO COPY		Rp 15,000	0.5	Rp 69,675,346
8-Jan-13	AIR MINUM 3 DOS		Rp 39,000	0.5	Rp 69,636,346
8-Jan-13	BIAYA KOMSUMSI RAPAT TGL 8-1-2013		Rp 600,000	0.5	Rp 69,036,346
8-Jan-13	TRANSPORT PENGURUS RAPAT TGL 8-1-2013		Rp 2,200,000	0.5	Rp 66,836,346
8-Jan-13	INSENTIF UPZ DINAS PU 2012		Rp 705,680	0.5	Rp 66,130,666
8-Jan-13	INSENTIF UPZ SMP 20		Rp 388,800	0.5	Rp 65,741,866
8-Jan-13	BAYAR AIR PAM NOPEMBER 2012		Rp 190,240	0.5	Rp 65,551,626
8-Jan-13	BAYAR AIR PAM DESEMBER 2012		Rp 166,830	0.5	Rp 65,384,796
8-Jan-13	HARGA PAYUNG JUMBO UNTUK SEKRETARIAT		Rp 50,000	0.5	Rp 65,334,796
8-Jan-13	NASI DOS SEKRETARIAT /LEMBUR TGL 15-1-2013		Rp 96,000		Rp 65,238,796
8-Jan-13	NASI DOS SEKRETARIAT /LEMBUR TGL 16-1-2013		Rp 70,000		Rp 65,168,796
8-Jan-13	TRANSPORT PENGURUS RAPAT TGL 16-1-2013		Rp 2,200,000	0.5	Rp 62,968,796
8-Jan-13	TRANSPORT SRY SURYA TGL 16-1-2013		Rp 100,000	0.5	Rp 62,868,796
8-Jan-13	TRIBUN TIMUR		Rp 70,000	0.5	Rp 62,798,796
8-Jan-13	NURIMNA	Rp 610,000			Rp 63,408,796
8-Jan-13	UPTD MAKASSAR	Rp 3,484,000			Rp 66,892,796
8-Jan-13	SMA 12	Rp 1,000,000			Rp 67,892,796
8-Jan-13	SMA 10	Rp 1,110,000			Rp 69,002,796
8-Jan-13	SMP 14	Rp 710,000			Rp 69,712,796
8-Jan-13	SMA 6	Rp 1,230,000			Rp 70,942,796
8-Jan-13	UPTD PEND KEC BONTOTALA	Rp 1,330,000			Rp 72,272,796
8-Jan-13	KEC BIRINGKANAYA	Rp 585,000			Rp 72,857,796
8-Jan-13	UPTD KEC MARISO	Rp 1,515,000			Rp 74,372,796
8-Jan-13	SMP 4	Rp 852,000			Rp 75,224,796
8-Jan-13	UPTD KEC TAMALANREA	Rp 3,500,000			Rp 78,724,796
8-Jan-13	SMP 19	Rp 1,165,000			Rp 79,889,796
8-Jan-13	UPTD KEC PANAKKUKANG	Rp 4,000,000			Rp 83,889,796
8-Jan-13	KEC MANGGALA	Rp 277,000			Rp 84,166,796
8-Jan-13	SSMK 7	Rp 900,000			Rp 85,066,796
8-Jan-13	BADAN KB	Rp 2,310,000			Rp 87,376,796
8-Jan-13	DRA BESSE MAEMUNAH	Rp 1,700,000			Rp 89,076,796
8-Jan-13	SETORAN TUNAI	Rp 737,000			Rp 89,813,796
8-Jan-13	KEC WUJUK TANAH	Rp 485,000			Rp 90,298,796
8-Jan-13	SMP 24	Rp 310,000			Rp 90,608,796
8-Jan-13	SNM 2	Rp 1,730,000			Rp 92,338,796
8-Jan-13	PD PANGK	Rp 330,000			Rp 92,668,796

10-Dec-13	KEC BIRINGKANAYA	Rp	540,000			Rp	224,270,078
10-Dec-13	SMA 6	Rp	1,125,000			Rp	225,395,078
10-Dec-13	SMA 5	Rp	1,712,000			Rp	227,107,078
10-Dec-13	IRHA EDIANSYA	Rp	120,000			Rp	227,227,078
10-Dec-13	HU BASSE RASIDAH	Rp	120,000			Rp	227,347,078
10-Dec-13	HUSNUL MASIR	Rp	60,000			Rp	227,407,078
10-Dec-13	NUR HASANANG,SH	Rp	75,000			Rp	227,482,078
10-Dec-13	SMP 8	Rp	2,010,000			Rp	229,492,078
10-Dec-13	UPTD PEND KEC RAPPOCINI	Rp	5,750,000			Rp	235,242,078
10-Dec-13	KEC UJUNG TANAH	Rp	450,000			Rp	235,692,078
10-Dec-13	KARSALI	Rp	1,185,000			Rp	236,877,078
10-Dec-13	NURHAYATI	Rp	3,800,000			Rp	240,677,078
10-Dec-13	DRS RIAN TO	Rp	522,000			Rp	241,199,078
10-Dec-13	PD PASAR MAKASSAR RAYA	Rp	391,000			Rp	241,590,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,165,000			Rp	246,755,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,170,000			Rp	251,925,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,160,000			Rp	257,085,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,416,000			Rp	262,501,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,416,000			Rp	267,917,078
10-Dec-13	H HUSAIN	Rp	5,426,000			Rp	273,343,078
10-Dec-13	SMA 1	Rp	590,000			Rp	273,933,078
10-Dec-13	UANG MAKAN SOPIR AMBULANCE BLN DESEMBER			Rp	1,125,000		Rp 272,808,078
	JUMLAH BULAN BERJALAN	Rp	1,354,024,005	Rp	1,081,215,927		
	JUMLAH BULAN INI	Rp	1,221,964,449				
	SALDO						Rp 272,808,078

MENGETAHUI
KETUA BAZNAS KOTA MAKASSAR,


DRS.H ABD LATIEF JUSUF



MAKASSAR, DESEMBER 2013

BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR


H KATJONG TAHIR,SH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4.5

LAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2013			
A. PENERIMAAN ZAKAT TAHUN 2013			Rp 131,304,900
<hr/>			
B. 1. BIDANG PEMBINAAN KEAGAMAAN :			
* BANTUAN GURU MENGAJI TPA / TRADISONAL	Rp	1,050,000	
* BANTUAN MUALLAF	Rp	11,500,000	
JUMLAH PEMBINAAN KEAGAMAAN			Rp 12,550,000
2. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM			
* BANTUAN FAKIR MISKIN	Rp	35,000,000	
JUMLAH EKONOMI DAN SDM			Rp 35,000,000
3. BAGIAN AMIL			
* BAGIAN INSENTIF UPZ	Rp	2,247,600	
JUMLAH BAGIAN AMIL			Rp 2,247,600
TOTAL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 2013			Rp 49,797,600
C. SALDO ZAKATTAHUN 2013 (A - B)			Rp 81,507,300
TERBILANG : DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH			
MENGETAHUI		MAKASSAR, DESEMBER 2013	
KETUA BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR		BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR	
			
DRS.H ABD LATIEF JUSUF		H KATJONG TAHIR,SH	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**LAPORAN PENGELOLAAN DANA INFAK HAJI SE-KOTA MAKASSAR
TAHUN 2013**

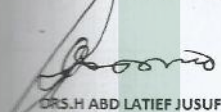
A. PENERIMAAN INFAK HAJI TAHUN 2013		Rp400,502,450
<hr/>		
B. 2. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM		
* BANTUAN FAKIR MISKIN	Rp 305,955,000	
JUMLAH EKONOMI DAN SDM		Rp305,955,000
BAGIAN AMIL		
* BAGIAN OPRASIONAL PENGURUS	Rp 60,800,000	
* BAGIAN OPRASIONAL SEKRETARIAT	Rp 313,750	
* BIAYA ATM	Rp 3,382,600	
JUMLAH BAGIAN AMIL		Rp 64,496,350
TOTAL PENDISTRIBUSIAN INFAK PNS 2013		Rp370,451,350
C. INFAK HAJI TAHUN 2013 (A - B)		Rp 30,051,100

TERBILANG : TIGA PULUH JUTA LIMA PULUH SATU RIBU SERATUS RUPIAH

MAKASSAR, DESEMBER 2013

MENGETAHUI
KETUA BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR

BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR


CRS.H ABD LATIEF JUSUF


H KATJONG TAHIR,SH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**LAPORAN PENGELOLAAN DANA INFAK PNS SE-KOTA MAKASSAR
TAHUN 2013**

A. PENERIMAAN INFAK PNS TAHUN 2013

Rp 1,354,024,005

B. PENYALURAN / PENDISTRIBUSIAN

1. BIDANG PEMBINAAN KEAGAMAAN :

* BANTUAN MASJID	Rp	26,000,000	
* BANTUAN GURU MENGAJI TPA / TRADISONAL	Rp	259,900,000	
* BANTUAN MUALLAF	Rp	500,000	
* BANTUAN / BIAYA KEGIATAN AGAMA ISLAM	Rp	34,400,000	
JUMLAH PEMBINAAN KEAGAMAAN			Rp 320,800,000

2. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM

* BANTUAN FAKIR MISKIN	Rp	70,756,800	
* BANTUAN MUSAFIR	Rp	1,000,000	
* BANTUAN MODAL USAHA	Rp	1,000,000	
* PELATIHAN KETERAMPILAN	Rp	14,277,500	
JUMLAH EKONOMI DAN SDM			Rp 87,034,300

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

* BANTUAN PENDIDIKAN ISIDENTIL	Rp	12,900,000	
* BANTUAN PENDIDIKAN BEASISWA FULL	Rp	151,250,000	
* BANTUAN PENGobatan	Rp	22,244,000	
* JUMLAH PELY. KESEHATAN & PENDIDIKAN			Rp 186,394,000

BIDANG SOSIAL

* BANTUAN BENCANA ALAM	Rp	8,975,000	
* BANTUAN TENDA DAN KURSI DUKA	Rp	225,540,000	
* BANTUAN PELAYANAN MOBIL AMBULANCE	Rp	37,196,000	
* BANTUAN SOSIAL LAINNYA	Rp	2,768,500	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL			Rp 274,479,500

BAGIAN AMIL

* BAGIAN INSENTIF UPZ	Rp	110,663,097	
* BAGIAN OPERASIONAL PENGURUS	Rp	63,965,000	
* BAGIAN OPERASIONAL SEKRETARIAT	Rp	7,509,530	
* BIAYA ATK	Rp	11,045,500	
* INVENTARIS KANTOR	Rp	19,325,000	
JUMLAH BAGIAN AMIL			Rp 212,508,127

TOTAL PENDISTRIBUSIAN INFAK PNS 2013

Rp 1,081,216,927

SALDO INFAK PNS TAHUN 2013 (A - B)

Rp 272,808,078

TERBILANG : DUA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN RIBU
TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH

DI MENGETAHUI

WETUA / BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR

IRISLIH ABD LATIEF JUSUF

MAKASSAR, DESEMBER 2013

BENDAHARA BAZNAS KOTA MAKASSAR

H. KATJONG TAHIR, SH